

**STRATEGI PRIORITAS PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO
(Studi pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2014-2018)**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh:

**RIDLO WIDHIANTO
NIM. 125080401111016**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

**STRATEGI PRIORITAS PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**
(Studi pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2014-2018)

SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh:
RIDLO WIDHIANTO
NIM. 125080401111016



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

SKRIPSI
STRATEGI PRIORITAS PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO
(Studi pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2014-2018)

Oleh:
RIDLO WIDHIANTO
NIM. 125080401111016

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal: 1 Juni 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SK. Dekan No. :
Tanggal:

Dosen Penguji I,



(Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP)
NIP. 19640228 198903 2 011
Tanggal: 13 JUN 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I



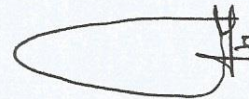
(Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si)
NIP. 19740220 200312 2 001
Tanggal: 13 JUN 2016

Dosen Penguji II



(Zainal Abidin, S.Pi, MP, MBA)
NIP. 19770221 200212 1 008
Tanggal: 13 JUN 2016

Dosen Pembimbing II



(Mochammad Fattah, S.Pi, M.Si)
NIP. 2015 0686 05131 001
Tanggal: 13 JUN 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan



(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal: 13 JUN 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam SKRIPSI yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Karena sepanjang pengetahuan saya juga, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti dapat dibuktikan SKRIPSI ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Malang, 1 Juni 2016

Ridlo Widhianto



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang selalu memberikan nasehat, dorongan, doa serta motivasi yang luar biasa.
2. Ibu Erlinda Indrayani S.Pi, M.Si dan Bapak Mochammad Fattah S.Pi, M.Si selaku dosen pembimbing, yang selalu berusaha meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis di dalam menyusun skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP dan Bapak Zainal Abidin, S.Pi, MP,.MBA selaku dosen penguji, yang mau memberikan masukan lebih dalam, sehingga tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Ir. Imam Suprayogi selaku Kepala Bidang Usaha Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis saat melaksanakan penelitian.
5. Kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikannku motivasi, dukungan serta doa.
6. Teman-teman IMSAK (Ikatan Mahasiswa Semester Akhir) PPM Malang Raya yang selalu memeberikan dorongan, motivasi, support, serta doa yang tiada habisnya.
7. Keluarga besar PPM Baitul Jannah Malang, yang mau mewadahi penulis didalam mengejar dan meraih cita cita dunia serta akhirot.
8. Pasmus GTA (Griya Timur Atas), Rendi, Ega, Odi, Derry, Fian, Alif, Firman, Krismanto atas dukungan dorongan serta doanya.

RINGKASAN

RIDLO WIDHIANTO. STRATEGI PRIORITAS PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018)**(dalam bimbingan Erlinda Indrayani S.Pi, M.Si dan Mochammad Fattah S.Pi, M.Si)**

Bojonegoro adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang dilihat dari keadaan wilayahnya kurang sesuai ketika sebuah kegiatan perikanan dilakukan disana. Menurut data BPS tahun 2013, kontribusi sektor perikanan Bojonegoro hanya sebesar 0,25 % dari total produksi ikan di Jawa Timur yang sebesar 1,4 juta ton. Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki peran yang besar dalam upaya pengembangan sektor perikanan di Bojonegoro. Melalui Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014-2015, pemerintah daerah menyiapkan beberapa program dan kegiatan dalam upaya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun berjalan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif pemilihan strategi prioritas kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta lokasi sasaran pelaksanaannya.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: (1) keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro, (2) Kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro, (3) Wilayah basis perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Bojonegoro dan, (4) Strategi prioritas yang perlu dilakukan dalam upaya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro pada bulan Februari 2016.

Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penyebaran kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi, data produksi ikan setiap kecamatan tahun 2011-2015, data pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro, dan data keadaan umum Kabupaten Bojonegoro. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi kegiatan observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Teknik penentuan responden dilakukan dengan teknik *Nonprobability sampling* jenis *purposive sampling*, responden terdiri atas 4 orang yang menurut pertimbangan, ke empat orang ini adalah orang-orang yang paling tahu terkait keadaan umum sektor perikanan di Bojonegoro dan ikut terlibat dalam perumusan serta mengerti arah strategi kebijakan yang ada dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif. Analisa data kuantitatif dilakukan menggunakan metode *Location Quotient* dan *Anayitical Hierarchi Process* (AHP).

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro terdiri atas sub sektor perikanan tangkap

dan perikanan budidaya. Kegiatan perikanan tangkap dilakukan di perairan umum, meliputi sungai, waduk, embung, dan rawa. Sedangkan kegiatan perikanan budidaya dilakuakn dengan 3 sistem budidaya yang meliputi, budidaya menggunakan kolam, sawah tambak dan mina padi. Dalam 5 tahun terakhir perikanan budidaya menjadi sub sektor andalan pada sektor perikanan di Bojonegoro. Kontribusi sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro yang dilihat melalui PAD yang didapatkan, menunjukkan nilai kontribusi sektor perikanan pada tahun 2014 sebesar 0,0051 % dan pada tahun 2015 sebesar 0,0058 %.

Kecamatan Temayang menjadi wilayah basis perikanan tangkap dengan perolehan nial LQ tertinggi yaitu sebesar 3,206. Sementara Kecamatan Dander menjadi wilayah basis perikanan budidaya dengan perolehan nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 1,35.

Secara berurutan dengan menggunakan metode AHP program prioritas yang terpilih adalah Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan, Program Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan, Pengelolaan, dan Pemasaran Produk Perikanan, dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Sementara secara berurutan kegiatan prioritas yang terpilih adalah Pengembangan Pakan Mandiri, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan, Pengembangan Sistem Pemanfaatan Lahan, Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan, Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Diversifikasi Produk Olahan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Penyediaan Sarana Penyuluhan Ikan, *Anty Proverty Program*, Penerapan system rantai dingin dan sanitas *hygiene*, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran, Pengkayaan Sumberdaya Ikan, dan Stimulasi Alat Bantu Penangkapan Ikan.

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah dengan adanya output yang dihasilkan pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi serta alternatif pengambilan keputusan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tercantum dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro pada masa periode 2016-2018. Selain itu masyarakat juga dapat menjadikan peluang usaha di sektor perikanan baik usaha budidaya maupun penangkapan ikan, dengan cara melihat potensi yang ada di setiap wilayah kecamatan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rohmat dan hidayah-Mu dapat menyajikan laporan skripsi yang berjudul **“Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (studi pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018)”**. Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi, keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro, kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro, wilayah basis perikanan tangkap dan budidaya, dan startegi prioritas pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojoegoro yang tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurantepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 1 Juni 2016

Ridlo Widhianto

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PENYATAAN ORISINALITAS	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Kegunaan	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Sektor Perikanan	9
2.3 Potensi Perikanan.....	10
2.4 Perencanaan Pembangunan	12
2.5 Pertumbuhan Ekonomi	13
2.6 Pendapatan Asli Daerah	13
2.7 Ekonomi Basis	14
2.8 <i>Analythic Hierarchy Process (AHP)</i>	16
2.9 Kerangka Pemikiran.....	19
3. METODE PENELITIAN	22
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	22
3.2 Jenis Penelitian.....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	22
3.3.1 Jenis Data.....	23
3.3.2 Sumber Data.....	23
3.3.3.1 Data Primer	23
3.3.3.2 Data Sekunder	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4.1 Observasi.....	25
3.4.2 Wawancara.....	25
3.4.3 Kuisisioner.....	26
3.4.4 Dokumentasi.....	26
3.5 Teknik Penentuan Responden.....	27



3.6 Analisa Data	28
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Letak Geografis dan Topografis Kabupaten Bojonegoro	38
4.1.2 Penduduk dan Tenaga Kerja.....	38
4.1.3 Pendidikan dan Agama.....	39
4.2 Keadaan Umum Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro	39
4.3 Gambaran Umum Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018	42
4.4 Kontribusi Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro.....	51
4.5 Wilayah Basis Perikanan	53
4.6 Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan	58
4.7 Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (Level Pertama)	61
4.8 Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (Level Kedua)	64
4.9 Penilaian Bobot Akhir Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro	69
4.10 Implikasi dan Output Penelitian Mengenai Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro	71
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	



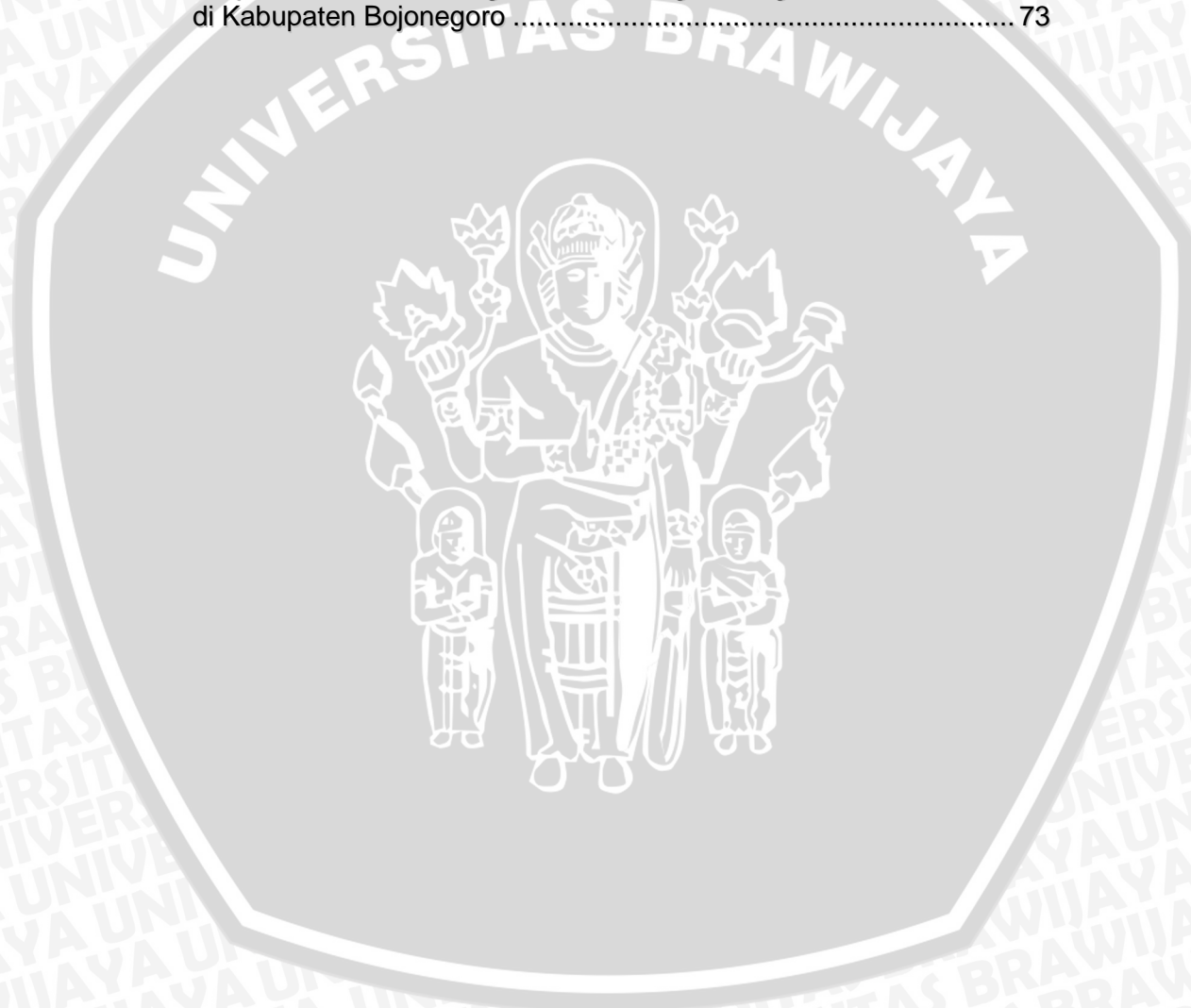
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian.	21
Gambar 4.1.	Grafik LQ Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015	54
Gambar 4.2.	Grafik LQ Wilayah Basis Perikanan Tangkap	55
Gambar 4.3	Wilayah Basis Perikanan Tangkap Terpilih	56
Gambar 4.4	Grafik LQ Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015.	57
Gambar 4.5	Grafik LQ Wilayah Basis Perikanan Budidaya	57
Gambar 4.6	Wilayah Basis Perikanan Budidaya Terpilih	58
Gambar 4.7	Hirarki Strategi Pengembangan Sektor Perikanan di Bojonegoro.....	60
Gambar 4.8	Pembobotan Nilai Strategi Pengembangan Sektor Perikanan di Bojonegoro.	61
Gambar 4.9	Pembobotan Nilai Program Optimalisasi Penyuluhan, Pengelolaan, dan Pemasaran Produk Perikanan	64
Gambar 4.10	Pembobotan Nilai Program Pengembangan Perikanan Tangkap	66
Gambar 4.11	Pembobotan Nilai Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan.....	67
Gambar 4.12	Bobot Nilai Akhir Strategi Pengembangan Sektor Perikanan.	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Perbandingan <i>Saaty</i>	32
Tabel 3.2 Contoh Formula matriks <i>Pair-wise Comparison</i>	33
Tabel 3.3 Nilai Random Indeks (RI)	34
Tabel 4.1 Perkembangan Perikanan Budidaya	40
Tabel 4.2 Perkembangan Perikanan Tangkap	41
Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja SPKD Pada Renstra Disnakan Kab. Bojonegoro (2014-2018)	51
Tabel 4.4 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro.....	52
Tabel 4.5 Nilai Kontibusi Perbandingan Sektor Budidaya dan Penangkapan...	63
Tabel 4.6 Output Penelitian Statregi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Penelitian	80
Lampiran 2. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro	81
Lampiran 3. Expert Choice	86
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	90



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menjadi salah satu Negara penghasil sumberdaya perikanan terbesar di dunia. Menurut data dari FAO (2012) dalam Abdurrahman (2014), Indonesia adalah Negara penghasil perikanan tangkap terbesar ketiga di dunia dengan total produksi 5,7 juta ton per tahun hal ini dikarenakan letak indonesia yang sangat strategis dan potensial dalam pemanfaatan sumberdaya lautnya dimana $\frac{3}{4}$ atau sekitar 6,28 juta km² kawasannya berupa lautan. Selain itu Indonesia juga menjadi penghasil perikanan budidaya terbesar keempat di dunia dengan total hasil produksi sebesar 2,7 juta ton per tahun. Hal ini membuktikan bahwa potensi sumberdaya perikanan di Indonesia begitu besar.

Menurut Cahyaningrum (2015), Sektor perikanan adalah salah satu sektor andalan yang dapat dipilih dalam upaya pemulihan ekonomi karena beberapa alasan, antara lain: (1) Sumberdaya perikanan, baik melalui kegiatan penangkapan maupun budidaya yang masih cukup melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal, (2) Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor perikanan yang masih relatif kecil, tetapi memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dan bahkan peningkatannya tertinggi dibandingkan dengan sektor yang lain, (3) permintaan ikan dunia yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan tingginya pendidikan sedangkan kemampuan untuk menyediakan stok sumberdaya yang semakin berkurang, (4) pola hidup masyarakat yang dicirikan mulai selektif terhadap pemilihan makanan yang disajikan dari kualitas gizinya. Hal inilah yang menjadi salah satu dasai bahwa sektor perikanan di Indonesia yang memiliki potensi begitu besar, mampu untuk lebih bisa dikembangkan lagi dalam upaya pembangunan perekonomian di Indonesia.

Perikanan sendiri menurut UU No 45 tahun 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam mewujudkan sebuah pemanfaatan sumberdaya yang optimal di sektor perikanan, semua sistem yang telah ada perlu dijalankan secara terstruktur dan tertata dengan baik. Tetapi dalam mewujudkannya, perlu adanya sebuah dukungan melalui sebuah kebijakan dan startegi yang tepat sasaran yang mampu mendukung berjalannya semua sistem tersebut. Dalam hal ini pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan beberapa stekholder terkait, harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam upaya pengembangan sektor perikanan di Indonesia.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai kontribusi tinggi bagi perikanan di Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari BPS tahun 2013, Provinsi Jawa Timur masuk dalam 5 besar penghasil perikanan baik perikanan budidaya dengan total 995.962 ton, dan perikanan tangkap dengan total 386.895 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanannya untuk bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan perikanan Nasional.

Bojonegoro adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dilihat dari keadaan wilayahnya kurang sesuai ketika sebuah kegiatan perikanan dilakukan disana. Stok sumber daya air yang kurang maksimal dan lokasi daerah yang tidak memiliki kawasan laut menjadi salah satu faktor utama kegiatan perikanan di Bojonegoro kurang bisa berkembang. Menurut data dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2013, kontribusi sektor perikanan Bojonegoro hanya sebesar 0,25 % dari total produksi ikan di Jawa Timur yang sebesar 1,4 juta ton per tahun. Namun dengan kecilnya kontribusi yang saat ini masih diberikan

Bojonegoro serta sumberdaya alam yang kurang mendukung, tidak membuat pihak pemerintah daerah mengesampingkan sektor ini dalam upaya pengembangan didalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

Melalui upaya yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro, dengan visi dan misi menciptakan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan lumbung energi negeri yang produktif, berdaya saing, adil, bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memilih sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang dipandang mampu untuk dikembangkan dalam mensukseskan visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini sebagai instansi tertinggi yang menaungi kegiatan perikanan di Kabupaten Bojonegoro, memiliki kewajiban untuk membentuk sebuah penetapan strategi dan kebijakan dalam mensukseskan program pengembangan sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang ikut berkontribusi dalam menciptakan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri.

Rencana Strategi Jangka Menengah tahun 2014-2018, adalah sebuah rencana induk yang dibentuk Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan sektor perikanan di Bojonegoro dengan melihat isu isu yang saat ini berkembang di Kabupaten Bojonegoro terkait kegiatan perikanan. Didalam renstra yang dibuat terdapat berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan didalam jangka waktu 5 tahun kedepan untuk pengembangan sektor perikanan.

Adanya pelaksanaan renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan dalam jangka waktu selama 5 tahun, Sangatlah perlu adanya sebuah penentuan prioritas didalam pemilihan sejumlah program dan kegiatan yang telah tercantum untuk dilaksanakan di

dalam setiap tahunnya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepala Bidang Usaha Perikanan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam renstra, setiap tahun akan dilakukan secara kondisional menurut situasi dan kondisi yang ada.

Hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk memberikan alternatif pilihan prioritas terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah tercantum di dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilakukan. Pada penelitian ini peneliti melakukannya dengan cara melihat tingkat keterdesakan sebuah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan melihat keadaan lapang dan menilai persepsi dari beberapa pihak yang dianggap tahu tentang keadaan umum sektor perikanan yang saat ini ada di Kabupaten Bojonegoro beserta isu-isu yang mulai berkembang didalamnya, serta ikut terlibat secara langsung dalam pembentukan renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018.

Selain itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam renstra juga perlu adanya penetapan sebuah wilayah yang tepat dalam hal ini Kecamatan, untuk mendukung berjalannya kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat potensi perkembangan sebuah kecamatan dari total produksi perikanan yang diperolehnya melalui pengelompokan 2 sub sektor yang saat ini berkembang di Bojonegoro yaitu sektor perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan atau program prioritas yang telah terpilih dan akan dilakukan nantinya, bisa dilaksanakan di sebuah wilayah yang tepat menurut sektornya masing-masing. Sehingga harapannya kegiatan ataupun program yang dilaksanakan tersebut bisa berjalan secara maksimal dan mampu memberikan dampak yang nyata dan

lebih baik bagi perkembangan sektor perikanan yang telah ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini juga dapat menjadi salah satu upaya mensukseskan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk menciptakan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri khususnya melalui sektor perikanan.

Secara umum dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk memberikan kontribusinya dalam mensukseskan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini untuk menciptakan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri, terkhusus melalui pengembangan sektor perikanan. Melalui pemilihan program serta kegiatan prioritas dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018 dan penentuan wilayah basis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sebagai prioritas lokasi yang dituju atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana keadaan umum sektor perikanan yang ada saat ini di Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana kontribusi sektor perikanan dalam pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro?
3. Dimana letak wilayah basis perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Bojonegoro ?
4. Apa strategi prioritas yang perlu dilakukan dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro.
2. Kontribusi sektor perikanan dalam pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
3. Wilayah basis perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Bojonegoro.
4. Startegi prioritas yang perlu dilakukan dalam upaya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi:

1. Pemerintah

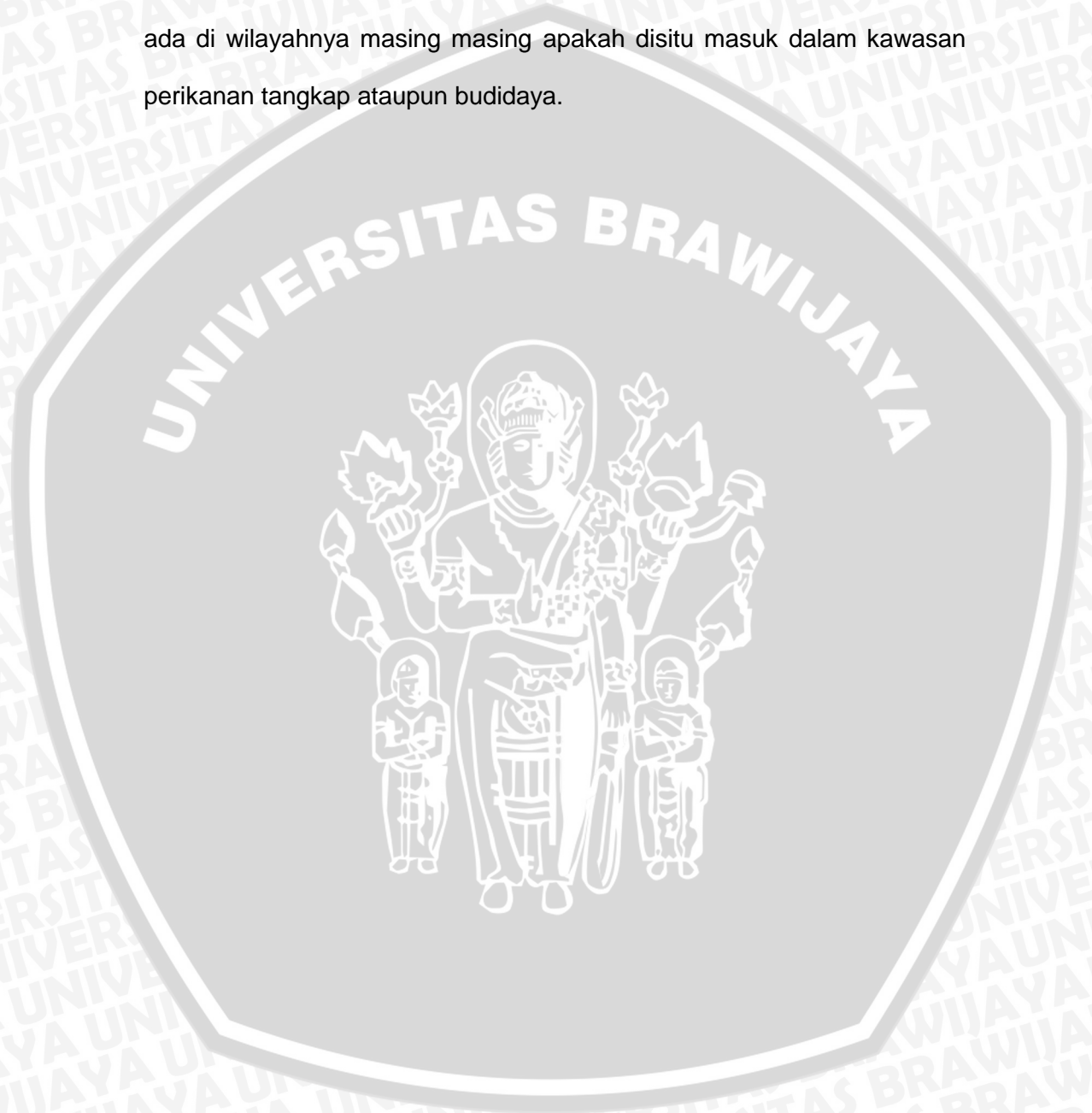
Sebagai bahan informasi dan pertimbangan serta sebagai alternatif sarana pengambilan keputusan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan prioritas terkait dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro yang telah tercantum di dalam renstra.

2. Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang keadaan umum sektor perikanan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro, dan untuk melihat kebijakan serta strategi prioritas mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu dengan melihat penilaian dari beberapa responden yang dianggap paling tahu dengan keadaan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro terkait isu isu didalamnya yang mulai berkembang dalam upaya pengembangan sektor perikanan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

3. Masyarakat

Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat didalam memulai dan mengembangkan usaha di sektor perikanan baik pada sektor budidaya atau penangkapan. Dengan cara melihat potensi yang ada di wilayahnya masing masing apakah disitu masuk dalam kawasan perikanan tangkap ataupun budidaya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada RENSTRA Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro tahun 2014-2018)” dilandasi oleh 3 penelitian terdahulu untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian yang dilakukan, antara lain meliputi:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil dan Kesimpulan
1	Masyahoro (2006)	Analisis Kebijakan Pengembangan Perikanan <i>Purse Seine</i> Dengan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) di Perairan Kabupaten Paragi Mountong	AHP	Dalam penelitian ini ada 3 alternatif opsi pengembangan yang diusulkan, yaitu, penambahan perikanan <i>purse seine</i> , pertahankan perikanan <i>purse seine</i> , dan penghapusan perikanan <i>purse seine</i> . Hasilnya opsi penambahan perikanan <i>purse seine</i> menjadi prioritas utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan perikanan <i>purse seine</i> dengan perolehan bobot sebesar 45 %, sedangkan penghapusan perikanan <i>purse seine</i> menjadi prioritas terakhir dengan bobot 23 %.
2	Tumada (2012)	Analisis Strategi Pengembangan Kabupaten Muna	<i>Location Quotient</i> (LQ) dan <i>Analythic Hierarchy Process</i> (AHP)	Dari perhitungan LQ sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Muna yaitu meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor

				jasa-jasa dengan perolehan nilai LQ di atas 1 yang mana masuk dalam sektor basis. Sedangkan dari hasil analisa menggunakan AHP prioritas kebijakan utama yang harus dilakukan di Kabupaten Muna adalah terkait pengembangan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan bobot mencapai 45,10
3	Baihaqi (2011)	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu	Metode Analisa Kontribusi PAD	Penelitian ini membahas tentang kontribusi PAD yang dihasilkan terhadap pendapatan daerah Provinsi Bengkulu. Pada penelitian ini nilai kontribusi PAD bagi pendapatan Daerah di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2008 sebesar 29,86 %, Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan PAD belum berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah yang dihasilkan Provinsi Bengkulu

2.2 Sektor Perikanan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU perikanan menyebutkan perikanan merupakan segala sesuatu yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya yang dimulai dari kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam satu sistem bisnis perikanan. Sedangkan yang disebut ikan

sendiri adalah segala jenis mahluk hidup yang sebagian atau keseluruhan hidupnya berada di perairan.

Sektor perikanan di Indonesia yang saat ini telah berkembang cukup pesat adalah sektor penangkapan dan budidaya ikan. Kegiatan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan kegiatan budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengelolaan perikanan yang tersistem baik sangat diperlukan agar mampu menciptakan kegiatan di sektor perikanan yang optimal, sehingga bisa menjadikan salah satu sektor yang mampu berkontribusi besar dalam perekonomian yang ada. Pengelolaan sendiri adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

2.3 Potensi Perikanan

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan posisi silangnya yang sangat strategis. Terletak diantara dua benua dan dua samudera. Luas kepulauan Indonesia adalah 9,8 juta km² (seluruh wilayah Indonesia), dan luas

wilayah lautnya 7,9 juta km²). Posisi silang yang strategis menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi silang seperti ini disamping menguntungkan juga membahayakan bagi Negara, baik bidang sosial ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar baik dari segi kualitas, kuantitas maupun keanekaragaman hayatinya. Menurut data dari FAO (2012) dalam Abdurrahman (2014), Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang memiliki nilai produksi ikan terbesar, baik dari sektor budidayanya maupun dari sektor penangkapannya. Namun pada kenyataannya, sektor perikanan yang saat ini baru dimanfaatkan khususnya dari sektor perikanan tangkap Indonesia masih 80 % dari total *Maximume Suistainable Yield* (MSY) yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwasanya masih kurang optimalnya kegiatan perikanan tangkap di Indonesia. Sehingga hal itu menjadi modal besar bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan melakukan kegiatan eksploitasi, harapannya mampu meningkatkan kontribusi sektor perikanan secara tidak langsung dalam mendukung upaya kegiatan pembangunan perekonomian di Indonesia.

Upaya dalam kegiatan mengoptimalkan pemanfaatan dari potensi sumberdaya kelautan dan perikanan serta menjadikan sektor kelautan perikanan sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional sendiri, masih membutuhkan upaya pencapaian serta terobosan dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan strategi kebijakan politik dan ekonomi serta sosial yang kondusif. Dalam hal ini aspek terpentingnya adalah perlu adanya koordinasi yang lebih baik dari segala elemen yang ada dipemerintahan (Cahyaningrum, 2015).

2.4 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah salah satu cara berfikir mengenai persoalan persoalan sosial ekonomi yang berorientasi pada masa yang akan datang dan sangat berkenaan hubungannya dengan tujuan dan keputusan keputusan kolektif serta kebijakan dan program yang menyeluruh, bila mana cara berfikir itu diterapkan maka dapat dikatakan bahwa perencanaan sedang dilaksanakan (Tumada, 2012).

Menurut Lewis (1994), sebuah rencana biasanya dimulai dengan meninjau kemajuan ekonomi suatu wilayah dalam tahun ke tahun yang baru berlalu terutama sejak rencana terakhir dirancangan. Perubahan-perubahan dicatat dalam jumlah penduduk, output nasional, investasi, tabungan konsumsi, pengeluaran pemerintah, perpajakan, neraca pembayaran dan keadaan masing masing industri utama. Namun yang perlu diketahui memberikan informasi bukan menjadi salah satu tujuan dari rencana. Dalam rencana pembangunan informasi demikian hanyalah pembuka tabir, untuk mengingatkan masalah masalah mana yang harus diperhatikan lebih lanjut.

Selain melihat dari kegiatan survey, dengan menilik sekumpulan sektor swasta yang ada dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan yang mana inti dari perencanaan untuk produktivitas yang lebih tinggi dalam sektor swasta terletak pada sekumpulan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang merangsang orang orang swasta untuk menggunakan waktu dan sumber dayanya dengan lebih produktif, yang mana kualitas sebuah rencana tergantung pada kualitas kebijaksanaan-kebijaksanaannya, bukan pada kualitas atau jumlah kuantitas ilmu hitungnya.



2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di Negara tersebut (Cahyaningrum, 2015).

Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah sangat diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan diberbagai bidang sekaligus pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya. Ada 9 sektor ekonomi atau kelompok lapangan usaha yang umumnya dapat dihitung dalam PDB (Produk Domestik Bruto) atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) jika dalam lingkup daerah. Faktor faktor tersebut meliputi:

1. Sektor pertanian dan perikanan
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor listrik, gas dan air bersih
5. Sektor bangunan
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi
8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Sektor jasa-jasa

Dan dari perhitungan sektor-sektor ekonomi tersebut dapat ditentukan dan dikethui kondisi struktur ekonomi dari suatu daerah.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan segala hak yang

dimiliki daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengadaaan pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan serta tanggung jawab kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi yang ada di daerahnya sendiri.

Sumber pendapatan asli daerah menurut UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu antara lain:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan asli daerah lain lain yang sah

Menurut Baihaqi (2011), untuk mengetahui nilai kontribusi sebuah sektor terhadap Pendapatan Asli Dearah sebuah wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Kontribusi sektor } i = \frac{\text{Pendapatan Sektor } i}{\text{PAD}} \times 100\%$$

2.7 Ekonomi Basis

Berdasarkan teori basis ekonomi, kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis dapat juga disebut sebagai kegiatan ekspor, yaitu kegiatan menjual barang atau jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan konsumsi lokal. Menurut

Adisasmita (2008) dalam Hilmiyati (2013), dijelaskan bahwa menurut basis ekspor, suatu wilayah bertumbuh atau berkembang sebagai akibat dari spesialisasi dalam kegiatan ekspor, dengan ekspor akan diperoleh pendapatan, hal ini dapat meningkatkan kekayaan dan kemampuan suatu wilayah untuk melaksanakan pembangunan dan membayar harga barang-barang yang diimpornya dari luar wilayah.

Menurut Tarigan (2007) dalam Hilmiyati (2013), ada beberapa cara dalam memilah kegiatan basis dan nonbasis, yaitu:

1. Metode Langsung

Metode langsung adalah metode yang dilakukan dengan cara survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Dari jawaban yang diberikan, dapat ditentukan berapa persen produk yang dijual ke luar wilayah dan berapa persen yang dipasarkan di dalam wilayah.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah mengukur kegiatan basis dan nonbasis secara tidak langsung. Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan asumsi atau disebut metode asumsi. Dalam metode ini, berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan lokal dianggap non basis.

3. Metode Campuran

Metode campuran adalah gabungan dari metode langsung dan tidak langsung. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti BPS. Dari data sekunder berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan non basis. Apabila porsi basis dan non basis tidak begitu kontras, porsi itu harus ditaksir dengan cara melakukan survey lagi dan harus ditentukan sektor mana yang surveinya cukup dengan pengumpulan data sekunder dan sektor mana yang mungkin membutuhkan sampling pengumpulan data langsung dari pelaku usaha.

4. Metode *Location Quotient*

Metode *Location Quotient* (LQ) dilakukan dengan cara membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional.

Dalam indikator jika nilai $LQ > 1$ berarti memberikan indikasi bahwa sektor tersebut adalah sektor basis, sedangkan apabila $LQ < 1$ berarti sektor tersebut adalah non basis.

2.8 *Analythic Hierarchy Process* (AHP)

Metode *Analythic Hierarchy Process* (AHP) adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari rangking prioritas atas suatu hal dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Diketahui sendiri dalam sebuah kehidupan bahwasanya seseorang pasti akan menghadapi suatu permasalahan, yang kemudian diperlukan sebuah *problem solving* dalam permasalahan tersebut dengan menentukan sebuah skala prioritas utama yang akan dilakukan (Tumada, 2012).

Pada dasarnya AHP adalah metode yang digunakan untuk memecah sebuah permasalahan yang kurang terstruktur untuk dikelompok-kelompokan, yang diatur dalam sebuah hirarki, dengan cara memasukan nilai numerik dari persepsi seseorang untuk menentukan skala prioritas didalam pengambilan keputusan. Metode ini membantu memecahkan sebuah persoalan yang kompleks dengan menstruktur sebuah hirarki kriteria dari pihak yang berkepentingan, yang mana hasilnya akan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas, Metode ini menggabungkan kekuatan perasaan dan logika seseorang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

Karakteristik AHP adalah suatu model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan model sebelumnya. Peralatan utama model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia.

Perbedaan mencolok AHP dengan model pengambilan keputusan lain adalah terletak pada inputnya. Model model yang sudah ada umumnya memakai input kuantitatif melalui data sekunder yang sudah diperoleh. Yang mana secara otomatis, model itu hanya bisa mengolah hal hal yang kuantitatif saja. Namun model AHP menggunakan input persepsi manusia yang dianggap ekspert sebagai input utamanya didalam mengambil keputusan prioritas. Kriteria ekspert disini bukan berarti seseorang itu harus pintar dan cerdas namun adalah orang yang mengetahui dan faham tentang sebuah permasalahan yang sedang dihadapi.

Kelebihan lain dari model AHP dibandingkan model pengambilan keputusan yang lain adalah terletak pada kemampuan memecahkan masalah yang *multiobjective* dan *multicriterias*. Kebanyakan model yang sudah ada menggunakan *single objective* dengan *multicriteria*. Contoh model *linier programming* memakai satu tujuan dengan banyak kendala (kriteria). Kelebihan

model AHP disebabkan oleh fleksibilitas yang tinggi terutama pada pembuatan hirarkinya. Sifat fleksibilitas ini dapat membuat model AHP mampu menangkap beberapa tujuan dan kriteria sekaligus dalam sebuah model atau hirarki. Karenanya keputusan yang dihasilkan dari AHP sudah akan memperhitungkan berbagai tujuan dan berbagai kriteria yang berbeda beda. Masalah masalah seperti konflik, perencanaan, proyeksi, alokasi sumberdaya, adalah beberapa dari banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan model AHP. Namun dengan banyak kelebihan yang dimiliki AHP, tidak membuat model ini lepas dari kekurangan. Salah satunya timbul ketika persepsi yang diberikan oleh seorang responden tidak diberikan secara hati nurani didalam memberikan penilaian yang disitu akan menjadikan kekeliruan yang amat fatal dan menjadikan penelitian ini tidak bermanfaat.

Secara umum pengambilan keputusan menggunakan metode AHP didasarkan pada langkah langkah berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, kemudian hirarki program dan dilanjutkan dengan hirarki kegiatan atas program yang ada
3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan (*pair-wise*) yang menggambarkan kontribusi relative atau pengaruh setiap hirarki terhadap masing-masing tujuan dan kriteria yang ada setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan dari pengambil keputusan
4. Menormalkan data yaitu membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom
5. Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsistensi maka pengambilan data perlu diulangi. Nilai *eigen vector*

- yang dimaksud adalah nilai *eigen vector* maksimum yang diperoleh dengan menggunakan matlab maupun dengan cara manual
6. Mengulangi langkah 3,4,5 untuk semua tingkat kriteria
 7. Mengitung nilai *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot dari setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen elemen pada tingkat hirarki terendah sampai dengan pencapaian tujuan
 8. Menguji konsistensi hirarki, jika tidak memenuhi $CR < 0,100$, maka penilaian harus diulangi kembali.

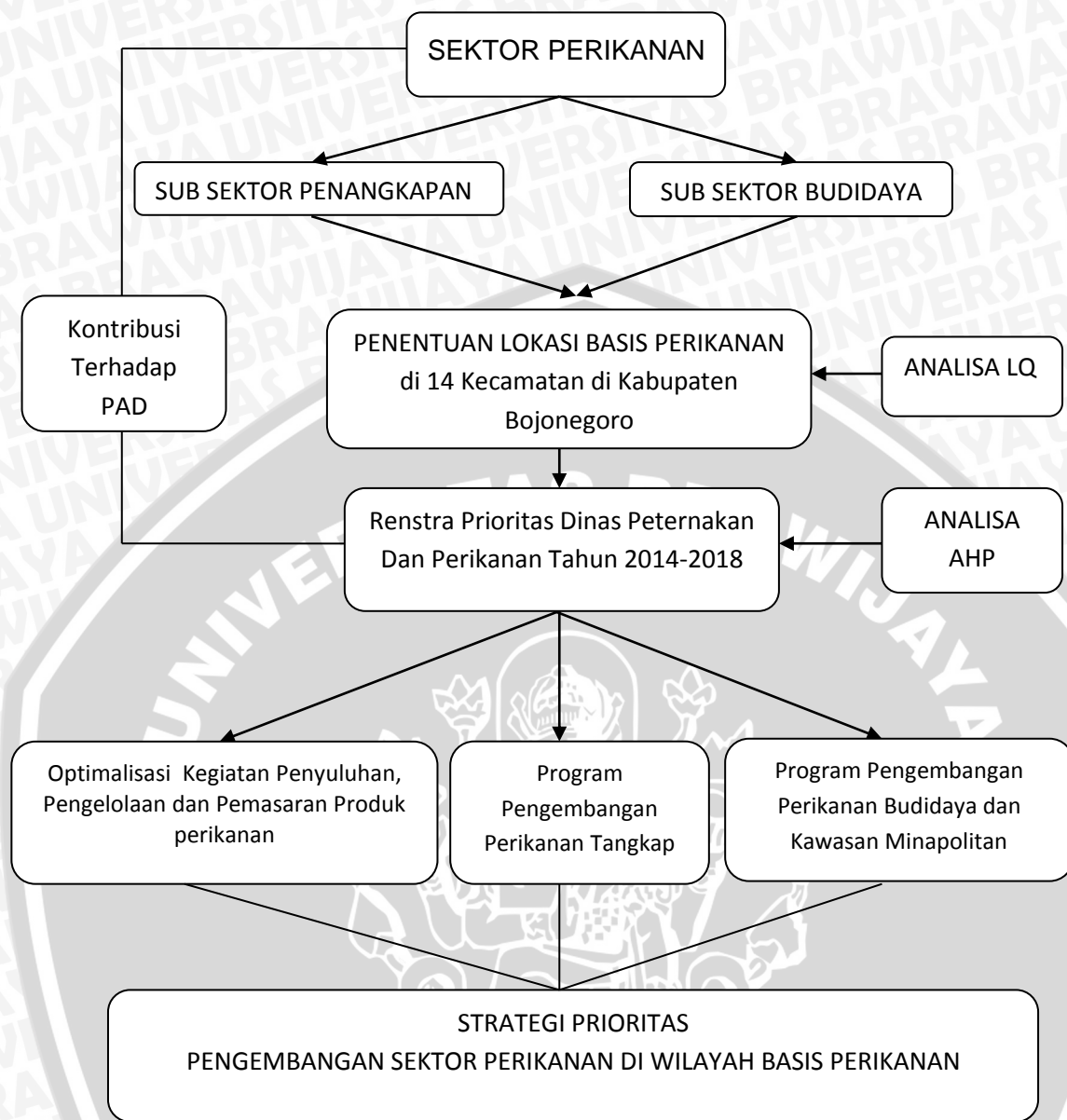
2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan kerangka konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian ini kerangka pemikiran dimulai dengan melihat keadaan umum sub sektor perikanan yang ada di Bojonegoro yaitu terkhusus dari sub sektor penangkapan dan sub sektor budidaya. Setelah mengetahui keadaan umum 2 sub sektor tersebut kemudian akan dilihat nilai kontribusi sektor perikanan terhadap PAD keseluruhan yang dihasilkan Kabupaten Bojonegoro dengan harapan mampu memberikan informasi sejauh mana kontribusi sektor perikanan dalam kontibusi pembangunan daerah di Bojonegoro dalam kurun waktu 2 tahun pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018. Kemudian setelah itu, dilakukan penentuan wilayah basis perikanan, dalam hal ini Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yang masuk pada sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang dapat digunakan sebagai skala prioritas pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan didalam mengambil keputusan

penanganan terhadap salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki potensi lebih agar dikembangkan terlebih dahulu. Metode analisa data yang digunakan dalam menentukan hal ini adalah dengan menggunakan metode LQ (*Location Quetiont*). Setelah itu, dengan menggunakan metode AHP (*Analitycal Hirarchie Process*) dan bantuan aplikasi *expert choice 11*, dilakukan penentuan skala prioritas dari setiap program dan kegiatan yang telah tersusun dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018 melalui penilaian responden. Responden dipilih dengan dasar bahwa merekalah yang dianggap paling tahu tentang keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro, serta ikut terlibat dalam perumusan strategi kebijakan yang termuat dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian mengenai “**Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada RENSTRA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018)**” dilaksanakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro pada bulan Februari 2016.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini secara umum menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Wirartha (2005), penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variable yang didapat di lapangan. Sedangkan menurut Sugiyono (2014), penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang didasari oleh *falsafah positivisme* yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati terukur, yang mana data-data yang diperoleh adalah data *numerical* (angka). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah sebuah penelitian yang menggambarkan kondisi, situasi, ataupun berbagai variable melalui data yang berbentuk *numerical* (angka) dan bersifat valid, fakta, dan sistematis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Munurut Sugiyono (2014), Secara umum data yang diperoleh ketika melakukan sebuah penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi problema dalam kehidupan sehari hari. Memahami berarti tahu tentang isi dari apa yang telah kita teliti.

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang nilainya berbentuk *numerik* atau angka yang kemudian akan digunakan untuk mengetahui hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrument. Data kualitatif adalah data

deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan yang diperoleh dari dokumen pribadi, catatan lapangan, hasil wawancara, dan tindakan responden dari objek yang diamati (Sugiyono, 2014).

3.3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil kuisisioner yang dibagikan pada setiap responden yang telah dipilih, wawancara dan observasi lapang, sedangkan data sekunder bersumber dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

3.3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang di observasikan secara langsung oleh peneliti sendiri dari lapangan yang berpacu pada penjelasan dari responden yang dilakukan secara wawancara khusus dengan tujuan khusus untuk memberikan informasi selengkap lengkapnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada (Sugiyono, 2014).

Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan melalui observasi secara langsung kepada responden yang dituju dengan melakukan wawancara terkait penjelasan berbagai program dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro melalui renstra tahun

2014-2018. Selain itu juga dilakukan penilaian melalui penyebaran kuisioner kepada 4 responden yang telah dipilih melalui pertimbangan, bahwa merekalah yang paling tahu mengenai perumusan dan arah strategi kebijakan yang dibuat melalui isu-isu yang telah berkembang terkait sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro.

3.3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh seorang peneliti secara tidak langsung yang umumnya dikumpulkan untuk menyelesaikan suatu identifikasi permasalahan yang sedang dihadapi dan biasanya ditemukan dengan cara yang singkat dan cepat. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder meliputi literature, artikel, jurnal, serta situs-situs internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang kita perlukan (Sugiyono, 2014).

Data sekunder diperoleh dari dokumen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang terkait keadaan umum sektor perikanan di Bojonegoro, rencana strategi jangka menengah sektor perikanan tahun 2014-2018 dan data total produksi ikan Kabupaten Bojonegoro tahun 2011-2015 dari setiap kecamatan. Kemudian juga data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten pada tahun 2014-2015, yang digunakan untuk melihat seberapa jauh kontribusi sektor perikanan terhadap PAD keseluruhan Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan bisa menjadi bahan evaluasi kegiatan pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga dokumen-dokumen lain melalui BPS terkait data keadaan umum Kabupaten Bojonegoro (keadaan topografi, geografis, serta kependudukan).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan untuk menyusun secara sistematis sebuah kajian yang telah dilakukan didalam kegiatan memecahkan suatu permasalahan. Pengumpulan data yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan untuk ditelaah dan diolah sehingga menjadi sebuah solusi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi (Sugiyono, 2014).

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan, yang mana memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2014).

Dalam kegiatan penelitian ini, observasi secara langsung dilakukan dengan melihat keadaan lapang sektor perikanan yang saat ini mulai berkembang di Kabupaten Bojonegoro.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (Sugiyono, 2014).

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa orang, yang mana terdiri dari Kepala Bidang Usaha Perikanan, Ka.Si Budidaya dan Pembenihan Perikanan, Ka.Si Bina Usaha Perikanan dan Ka.Si Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui penjelasan terkait keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro, dan juga penjelasan terkait setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014-2018.

3.4.3 Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Serta merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuisisioner juga cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian ini kuisisioner dilakukan untuk mendapatkan penilaian dari responden yang telah ditentukan dengan pertimbangan, mereka dianggap paling mengetahui tentang perumusan dan arah strategi kebijakan sektor perikanan yang telah tercantum didalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018.

3.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang untuk mendukung sebuah argument atau pernyataan (Sugiyono, 2014).

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data data sekunder baik dari Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Dispenda serta Badan Pusat Statistik yang mampu mendukung kegiatan penelitian ini. Selain itu kegiatan dokumentasi juga dilakukan untuk mendokumentasikan segala kegiatan peneliti didalam melakukan penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Responden

Teknik sampling didalam penentuan *informant* atau responden, dikelompokkan menjadi dua aspek utama antara lain *Probability sampling* dan *Nonprobability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang sama rata terhadap semua sampel atau anggota populasi yang telah ditunjuk. *Probability sampling* sendiri terdiri atas beberapa macam antara lain *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified sampling*, *area (cluster) sampling* (sampling menurut daerah). Sedangkan *Nonprobability sampling* adalah teknik pengumpulan sampel yang tidak memberikan peluang sama terhadap unsur-unsur yang telah dipilih untuk menjadi *informant* atau responden, adapun macam macam dari teknik *nonprobability sampling* antara lain *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling incidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, *snowball sampling* (Sugiyono, 2014).

Teknik penentuan responden atau *informant* digunakan teknik *Nonprobability sampling* jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2014), adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik penentuan sampel ini sebenarnya lebih cocok untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak memerlukan generalisasi.

Responden pada penelitian ini terdiri dari 4 orang, yang mana keempat orang tersebut telah ditentukan berdasarkan pertimbangan, bahwa merekalah

orang-orang yang dianggap paling mengetahui terkait perumusan serta arah strategi kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang tercantum dalam renstra tahun 2014-2015. Adapun keempat responden tersebut meliputi:

1. Kepala Bidang Usaha Perikanan Dinas Peternakan dan Kabupaten Bojonegoro
2. Kepala Seksi Budidaya dan Pembenihan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro
3. Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro
4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro

3.6 Analisa Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014), analisa data kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan bersama dalam sebuah penelitian namun cara melakukannya harus dilakukan dengan bergantian. Analisa data kualitatif dilakukan untuk menjabarkan setiap program dan kegiatan yang ada dalam rencana starategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018. Sedangkan analisa data kuantitatif dilakukan untuk menentukan wilayah basis perikanan tangkap maupun budidaya di Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode LQ, yaitu dengan cara membandingkan perolehan nilai total produksi ikan dari 2 sub sektor tersebut dari tahun 2011-2015. Selain itu juga untuk menentukan startegi prioritas jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014-2018 dengan menggunakan metode AHP.

Tujuan pertama pada penelitian untuk mengetahui keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro, diperoleh melalui analisa data kualitatif yang didapat dari wawancara khusus dengan Kepala Bidang Usaha Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dan juga melihat dokumen tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan kedua untuk melihat besaran kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro, didapatkan dengan metode analisa kuantitatif, yang di dapat melalui prosentase hasil perbandingan PAD yang diperoleh sektor perikanan yang kemudian dibandingkan dengan PAD keseluruhan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2015, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Sektor Perikanan} = \frac{\text{Jumlah pendapatan dari sektor perikanan}}{\text{Jumlah pendapatan keseluruhan PAD}} \times 100\%$$

Tujuan ketiga dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui wilayah basis perikanan tangkap maupun budidaya di Kabupaten Bojonegoro, didapat melalui analisa data kuantitatif dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Data total produksi ikan disetiap Kecamatan pada tahun 2011-2015, menjadi data yang diolah untuk menentukan lokasi kecamatan yang masuk pada wilayah basis perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Pangerang (2014) rumus didalam perhitungan data menggunakan metode LQ untuk menentukan wilayah basis sebuah komoditas adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{li/e}{Li/E}$$

Keterangan:

l_i = Total Produksi ikan dari kegiatan penangkapan/budidaya di wilayah kecamatan

e = Total produksi ikan di wilayah kecamatan

L_i = Total Produksi ikan dari kegiatan penangkapan/budidaya di wilayah kabupaten

E = Total produksi ikan di wilayah kabupaten

Ketentuan pada metode LQ adalah, Jika nilai $LQ > 1$ berarti memberikan indikasi bahwa wilayah tersebut adalah wilayah basis, sedangkan apabila $LQ < 1$ berarti wilayah tersebut adalah non basis.

Tujuan keempat untuk menentukan program dan kegiatan prioritas dalam upaya pengembangan sektor perikanan, dilakukan menggunakan analisa data kuantitatif menggunakan metode *Analythic Hierarchy Process* (AHP), yang mana bertujuan untuk menentukan alternatif prioritas program dan kegiatan yang dapat dikerjakan terlebih dahulu melalui penilaian kuisioner dari responden yang telah dipilih melalui pertimbangan sebelumnya.

Langkah awal dalam menggunakan metode AHP adalah dengan membuat sebuah hirarki terkait penentuan strategi prioritas yang berpedoman pada rencana startegi jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018. Hirarkri tersebut ini terdiri dari tiga level, yang terdiri atas:

1. Level pertama adalah tujuan akhir dari penelitian ini yaitu untuk penentuan prioritas strategi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro yang berpedoman pada renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018.
2. Level kedua berisi program program yang telah ada pada renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018 dalam upaya pengembangan sektor perikanan, yang meliputi:

- a. Optimalisasi kegiatan penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran produk perikanan
 - b. Pengembangan perikanan tangkap
 - c. Pengembangan perikanan budidaya dan kawasan minapolitan
3. Level ketiga berisi kegiatan kegiatan yang telah ada dari setiap program yang ada pada renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018, yang meliputi:
- a. Penyediaan sarana penyuluhan perikanan
 - b. Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)
 - c. Diversifikasi produk olahan bernilai tambah
 - d. Penerapan system rantai dingin dan sanitasi hygiene
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran ikan
 - f. Pengkayaan sumberdaya ikan
 - g. Stimulan alat bantu penangkapan ikan
 - h. Sarana dan prasarana budidaya ikan
 - i. Pembinaan dan pengembangan perikanan
 - j. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
 - k. Anti Proverty Program (APP)
 - l. Pengembangan system pemanfaatan lahan
 - m. Pengembangan pakan mandiri
 - n. Pengembangan bibit ikan unggul

Setelah itu akan dibuat sebuah kuisisioner yang berpedoman pada semua program dan kegiatan yang telah ada diatas dengan menggunakan sistem penilaian skala numerik mulai dari 1-9 yang mana memiliki definisi verbal, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Perbandingan Saaty

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu ragu dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7
Reciprocal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Asumsi masuk akal

Sumber: Thomas L Saaty (1980), *The Analythic Hierarchy Process*

Menurut Saaty (1980) dalam Tumada (2012), cara menentukan susunan prioritas elemen pada AHP dilakukan dengan menyusun perbandingan berpasangan yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh elemen untuk setiap sub hirarki, dapat dilihat di Tabel 3.2. Perbandingan tersebut ditransformasikan dalam bentuk matriks. Contoh, terdapat n objek yang dinotasikan dengan (A1, A2, An) yang akan dinilai pada tingkat kepentingannya antara lain Ai dan Aj yang dipresentasikan dalam matriks *Pair-wise Comparison*.

Tabel 3.2 Contoh Formula matriks *Pair-wise Comparison*

	A1	A2	...	Aa
A1	a11	a12	...	a1n
A2	a21	a22	...	a2n
...
An	am1	am1	...	Amn

Sumber : Bambang Permadi S (1992), *Analitycal Hierarchi Process*

Nilai a11 adalah nilai perbandingan elemen A1 (baris) terhadap A1 (kolom) yang menyatakan hubungan:

- Seberapa jauh tingkat kepentingan A1 (baris) terhadap kriteria C dibandingkan A1 (kolom) atau
- Seberapa jauh dominasi A1 (baris) terhadap A1 (kolom) atau
- Seberapa banyak sifat kriteria C terhadap pada A1 (baris) dibandingkan dengan A1 (kolom)

Kemudian setelah dilakukan tahap ini akan dilakukan uji konsistensi indeks rasio yang bertujuan untuk menguji konsistensi seorang responden didalam memberikan penilaian atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Nilai konsistensi yang dapat ditoleransi AHP adalah kurang dari 10%, apabila lebih dari 10% maka responden dianggap tidak konsisten didalam memberikan penilaian dan diperbolehkan untuk melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan. Adapun formulasi untuk menghitung indeks konsistensi adalah sebagai berikut:

Consistency index (CI):

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n - 1)} \dots\dots\dots(1)$$



Dimana: n = Jumlah kriteria bukan responden

λ = Rata rata konsistensi *vector*

Apabila $C1$ bernilai 0, maka nilai *pair-wise comparison matrik* tersebut konsisten.

Batas ketidakkonsistenan (*inconsistency*) yang telah ditetapkan oleh Thomas L Saaty ditentukan dengan Rasio Konsistensi (CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai random indeks (RI) yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory kemudian dikembangkan oleh Wharton School, seperti pada tabel 3.3. Nilai ini tergantung pada ordo matriks n .

Dengan demikian Rasio Konsistensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Consistency Ratio

$$CR = \frac{CI}{RI} \dots\dots\dots(2)$$

dimana: RI = *Random Index*

Tabel 3.3 Nilai Random Indeks (RI)

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0,000	0,000	0,580	0,900	0,120	1,240	1,320	1,410	1,450
N	10	11	12	13	14	15			
RI	1,490	1,510	1,480	1,560	1,570	1,590			

Sumber : Thomas L Saaty (1980). *The Analytical Hierarchy Process*

Bila matriks *pair-wise comparasion* dengan nilai CR lebih kecil dari 0,100 maka ketidakkonsistenan pendapat dari decision maker masih dapat diterima dan jika tidak penilaian perlu diulang.

Langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan mentabulasi hasil wawancara penelitian dalam bentuk tabel untuk kemudian dihitung nilai geomeannya, yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai sebuah data yang

diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan yang lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden. Rumus geomean tersebut adalah:

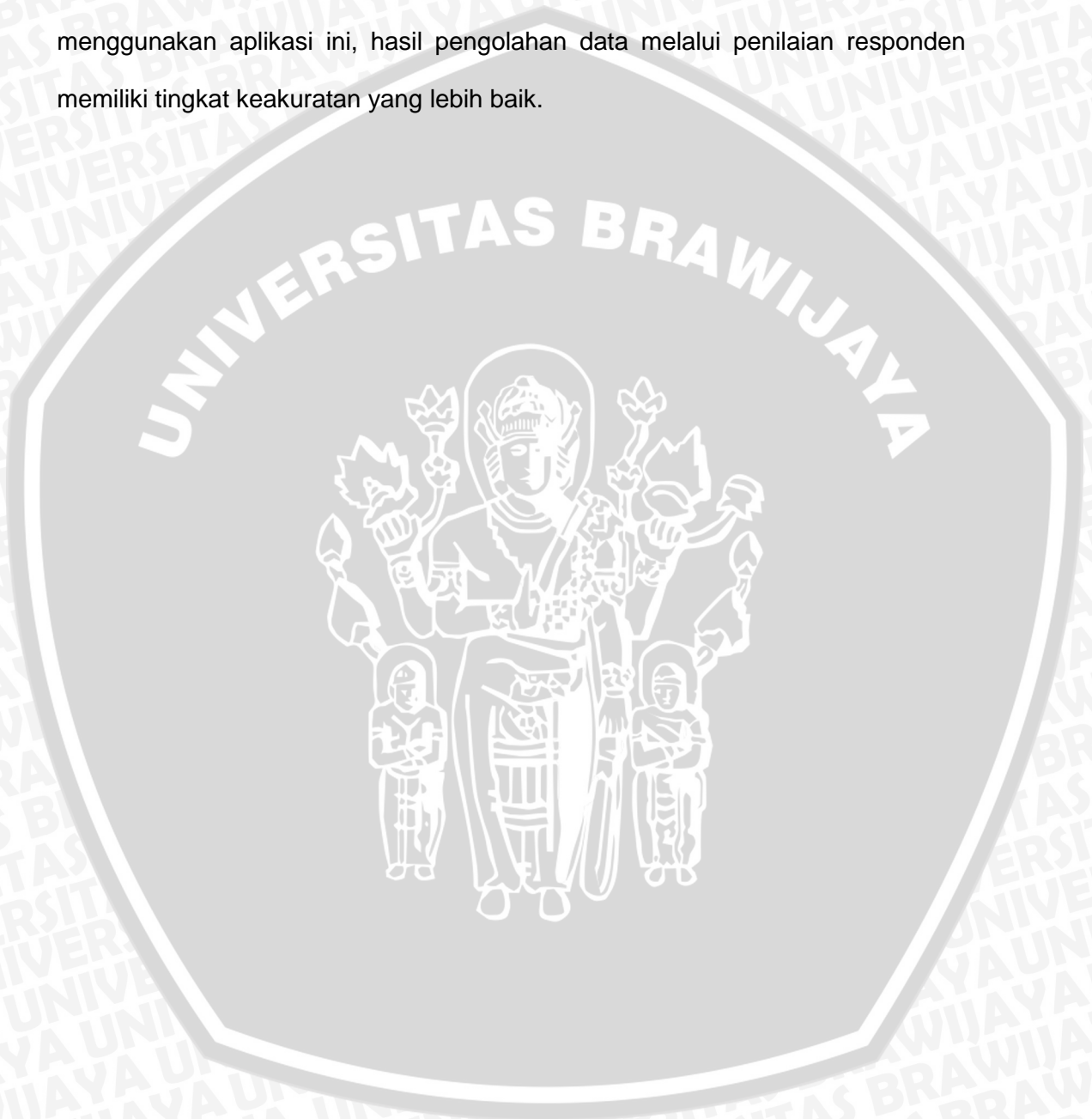
$$\sqrt[n]{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n} \dots\dots\dots(2)$$

Kemudaian setelah mengetahui hasil perhitungan tersebut akan dibentuk matriks *pair-wise comparasion* yang berfungsi untuk membandingkan antara berbagai kegiatan dalam menentukan strategi prioritas dengan menggunakan prinsip kebalikan dan kemudian diisi dengan angka geomean yang diperoleh dari tabulasi. Selanjutnya menghitung rasio tiap elemen pada matriks *pair-wise* dan di pindahkan untuk diubah menjadi *matrix priority vector*. Bobot nilai masing masing faktor akan diperoleh dengan mencari nilai rata rata baris dari matrik *priority vector*. Langkah terakhir adalah menghitung rasio konsistensi, dengan terlebih dahulu menghitung *weighted sum vector* yang diperoleh dari penjumlahan antara perkalian nilai rata rata pada *matrix priority vector* dengan nilai elemen dalam vektor sehingga akan diperoleh konsistensi vektor.

Selanjutnya mencari lamba (λ) yang diperoleh dari rata rata nilai konsistensi vector. Setelah mendapatkan nilai lamda (λ) dilanjutkan dengan menghitung nilai indeks konsistensi dengan persamaan (1) dan menghitung konsistensi rasio dengan menggunakan persamaan (2). Tahapan menghitung bobot yang telah dijelaskan berlaku untuk penghitungan bobot faktor (tingkatan pertama) maupun bobot variable (tingkatan kedua) dari struktur hirarki. Setelah bobot masing masing faktor (tingkatan pertama) dan bobot masing masing variable (tingkatan kedua) didapat maka untuk mendapatkan bobot final dilakukan dengan cara mengkalikan nilai masing masing bobot variabel level kedua dengan masing masing bobot faktor level pertama.

Selain menggunakan cara manual seperti yang dijelaskan diatas, analisa data melalui metode AHP dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak yaitu *expert choice 11*. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan aplikasi *expert choice* 11, dengan tujuan agar mempermudah didalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang ada pada renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018 yang akan dilakukan terlebih dahulu menurut tingkat keterdesakannya. Dengan menggunakan aplikasi ini, hasil pengolahan data melalui penilaian responden memiliki tingkat keakuratan yang lebih baik.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Topografis Kabupaten Bojonegoro

Secara astronomi Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi $112^{\circ}25'$ - $112^{\circ}09'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}59'$ - $7^{\circ}37'$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Bojonegoro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi,
Timur : Kabupaten Lamongan,
Utara : Kabupaten Tuban,
Barat : Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah.

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 430 Desa. Kabupaten Bojonegoro terdiri atas dataran rendah yang meliputi sepanjang aliran sungai bengawan solo, dan dataran tinggi di bagian selatan termasuk daerah gunung Pandan Kramat dan Gajah. Curah hujan di kabupaten bojonegoro memiliki intensitas yang berbeda disetiap wilayah. Dari data BPS data curah hujan tahun 2014 rata rata mencapai 1593 mm yang terkalkulasi dalam 89 hari, atau rata rata 17,8 mm perhari

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Kecamatan Tambakrejo adalah kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Bojonegoro mencapai 209,52 km², sedangkan kecamatan yang memiliki luasan daerah terkecil adalah Kecamatan Bojonegoro. Namun dengan adanya perbedaan luasan disetiap Kecamatan bukan menjadi tolak ukur besar kecilnya kegiatan perikanan di setiap Kecamatan tersebut.

4.1.2 Penduduk Dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro menurut data yang diperoleh dari BPS tahun 2014 sebanyak 1.453.043 jiwa, dengan rincian jumlah laki laki sebanyak 730.879 jiwa dan perempuan sebanyak 722.164 jiwa. Kecamatan Bojonegoro adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 98.128 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 381 jiwa/km².

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja di Bojonegoro mencapai 789.071 jiwa. Namun dari jumlah yang ada tidak menjadikan semua angkatan kerja yang ada saat ini mendapatkan pekerjaan, menurut data BPS di tahun 2014 angkatan kerja yang kini tertampung hanya mencapai 770.010 jiwa atau ada masih sekitar 19.061 angkatan kerja yang mengangur. Dalam data yang diperoleh di BPS sisa lowongan kerja di tahun 2014 sendiri tersisa 3400 lowongan, namun dengan jumlah yang ada tidak membuat semua angkatan kerja akan bisa tertampung. Hal ini lah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Bojonegoro untuk memberikan solusi kepada seluruh angkatan kerja yang tersisa agar tidak selalu berharap dari jumlah lowongan kerja yang ada di Bojonegoro, salah satunya yaitu bisa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masuk dalam usia kerja tentang peluang dan keuntungan seseorang didalam menciptakan sebuah lapangan usaha sendiri, harapannya dengan mereka nantinya mampu menciptakan sebuah lapangan usaha, mereka akan bisa mandiri didalam mencukupi perekonomian mereka dan bahkan memeberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Salah satu sektor lapangan usaha yang masih terbuka lebar peluang bisnisnya adalah sektor perikanan, yang mana sektor ini belum begitu dilirik oleh banyak masyarakat pada umumnya, khususnya di Bojonegoro. Harapannya sektor ini bisa menjadi alternatif peluang bagi mereka untuk membuka sebuah lapangan usaha.

4.1.3 Pendidikan dan Agama

Data BPS tahun 2014 menunjukkan di Kabupaten Bojonegoro saat ini terdapat 1630 UPTD pendidikan yang meliputi jenjang taman kanak-kanak sebanyak 654 unit, Sekolah Dasar 768 unit, Sekolah Menengah Pertama 108 unit, dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 100 unit, baik yang ada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kantor Kementerian Agama (kemenag) Kabupaten Bojonegoro, baik negeri maupun swasta.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk yang memeluk agama Islam masih mendominasi dari keseluruhan total pemeluk agama yang ada di Bojonegoro yaitu sebanyak 1.442.795 jiwa atau 99,3 %, dan agama Buddha menjadi agama yang paling sedikit pemeluknya yaitu sebanyak 551 jiwa atau 0,04 %. Hal ini berarti menjadikan potensi produk olahan perikanan menjadi sebuah produk yang dipilih karena memiliki nilai gizi yang tinggi serta halal bagi konsumsi sehari-hari masyarakat yang ada di Bojonegoro.

4.2 Keadaan Umum Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bojonegoro sendiri bukanlah sebuah Kabupaten yang menjadikan sektor perikanan sebagai basis perekonomian mereka, menurut data yang diperoleh dari BPS, sektor yang masih menjadi basis perekonomian di Kabupaten Bojonegoro masih diduduki oleh sektor pertanian dan pertambangan. Namun dengan adanya hal ini bukan berarti sektor perikanan tidak mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Kabupaten Bojonegoro terutama untuk pembangunan daerah. Sektor perikanan memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan dengan melihat stok sumberdaya ikan yang ada di BBI Mojoranu dan Ngampal serta ketersediaan air bagi kegiatan perikanan yang cukup melimpah di sebagian wilayah.

Perikanan di Kabupaten Bojonegoro saat ini terbagi menjadi 2 sub sektor yaitu sektor budidaya dan sektor penangkapan. Pada sektor budidaya kegiatan budidaya ikan masyarakat Bojonegoro terfokus pada 3 sistem budidaya yaitu sistem budidaya menggunakan kolam, sawah tambak, dan juga sistem mina padi.

Tabel 4.1 Perkembangan Perikanan Budidaya

No	Uraian	Satuan	Tahun		Prosentase Peningkatan
			2014	2015	
1	Budidaya		2.765,70	3.315,74	19,89 %
2	~ Kolam	Ton	2.339,84	2.806,14	19,93 %
3	~ Sawah Tambak	Ton	422,90	506,40	19,74 %
4	~ Mina Padi	Ton	3,00	3,20	6,67 %

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro (2016)

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa perkembangan produksi perikanan budidaya pada tahun 2015, pada system budidaya kolam mengalami peningkatan sebesar 19,93%, sawah tambak sebesar 19,74% dan mina padi sebesar 6,67% dari tahun 2014. Secara keseluruhan produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 19,89%,

Kegiatan sub sektor perikanan tangkap di Bojonegoro sendiri dilakukan didaerah perairan umum yang meliputi kawasan sungai, rawa, embung serta waduk yang tersebar di seluruh kawasan Bojonegoro.

Tabel 4.2 Perkembangan Perikanan Tangkap

No	Uraian	Satuan	Tahun		Prosentase Peningkatan
			2014	2015	
1	Penangkapan		898,50	908,82	1,15 %
2	~ Sungai	Ton	397,50	403,00	1,38 %
3	~ Rawa/lain-lain	Ton	28,80	29,03	0,80 %
4	~ Waduk	Ton	472,2	476,79	0,97 %

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro (2016)

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2015, produksi perikanan tangkap yang berada di sungai mengalami kenaikan sebesar 1,38%, rawa mengalami peningkatan sebesar 0,80%, dan waduk mengalami peningkatan sebesar 0,97%. Secara keseluruhan produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,15%.

Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2015, menunjukkan bahwasanya ada peningkatan jumlah pelaku usaha di sub sektor perikanan tangkap dari tahun 2014 sebanyak 1161 jiwa menjadi 1186 jiwa di tahun 2015. Selain itu peningkatan juga terjadi di sub sektor perikanan budidaya, yang pada tahun 2014 sebanyak 2176 jiwa menjadi 2225 jiwa di tahun 2015.

Hal ini menunjukkan minat masyarakat Bojonegoro untuk menjalankan usaha di bidang perikanan mulai meningkat. Sehingga hal inilah yang bisa menjadi dasar bahwasanya sektor perikanan di Bojonegoro memiliki potensi untuk terus dikembangkan, dalam upaya kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah.

4.3 Gambaran Umum Renstra Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018

Rencana strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018 merupakan sebuah penjabaran dari visi dan misi, strategi kebijakan, dan program pengembangan di sektor peternakan dan perikanan Kabupaten Bojonegoro. Renstra sendiri mengacu pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro yang secara umum bertujuan untuk membentuk Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri yang produktif, berdaya saing, adil, bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan.

Rencana strategi Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014-2018 menjabarkan mengenai rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari 2 sektor yang menjadi wewenang SKPD terkait untuk mengembangkan sektor peternakan maupun sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro.

Rencana strategi sektor perikanan memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan budidaya ikan diseluruh kawasan Kabupaten Bojonegoro. Parameter dari peningkatan kegiatan budidaya dilihat dari prosentase peningkatan luasan kolam ikan, peningkatan kegiatan mina padi, dan peningkatan jaring apung. Namun, dalam hal ini bukan berarti kegiatan budidaya menjadi satu satunya sektor yang dikembangkan, melainkan sektor penangkapan, dan kegiatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan juga ikut serta didalam rencana strategi pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rencana strategi pengembangan sektor perikanan, terdapat 3 program yang menjadi kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mencapai misi mereka untuk mewujudkan perikanan masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui peningkatan mutu pelayanan. Didalam renstra

terdapat 3 program yang menjadi strategi kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mengembangkan sektor perikanan, adapun 3 program tersebut adalah:

1. Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

Program optimalisasi kegiatan penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran produk perikanan secara umum memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan penyuluhan terkait seluruh hal yang berkaitan dengan perikanan kepada masyarakat luas di Kabupaten Bojonegoro, baik penyuluhan mengenai arti pentingnya mengkonsumsi ikan, tata cara pengelolaan kegiatan budidaya mulai dari kegiatan pra produksi hingga pasca panen, kegiatan penangkapan ikan, dan juga kegiatan pengelolaan serta pemasaran produk produk hasil perikanan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi perikanan yang bisa dioptimalkan dengan lebih baik. Secara tidak langsung nantinya kegiatan ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kegiatan perikanan terutama pada kegiatan pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan sebagai alternatif perekonomian masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Dalam program ini terdapat 5 kegiatan yang menjadi strategi kebijakan Dinas peternakan dan perikanan untuk tercapainya semua tujuan yang ada diatas, 5 kegiatan tersebut antara lain:

A. Penyediaan Sarana Penyuluhan Perikanan

Kegiatan penyediaan sarana penyuluhan perikanan secara umum bertujuan untuk menyediakan sarana untuk menunjang sistem penyuluhan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro didalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perikanan khususnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap tenaga penyuluh memiliki kualitas yang lebih baik,

dengan tersedianya sarana yang lengkap untuk melakukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat.

B. Gemarikan

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gemarikan adalah salah satu kegiatan yang ada di program optimalisasi kegiatan penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya ikan yang harapannya nanti akan mampu meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini pada dasarnya mengacu pada kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014 untuk meningkatkan konsumsi ikan seluruh masyarakat di Indonesia, yang nantinya secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan akan konsumsi ikan di Indonesia dan juga meningkatkan kegiatan di sektor perikanan.

C. Diversifikasi Produk Olahan

Kegiatan diversifikasi produk olahan dimaksudkan sebagai upaya pengoptimalan kegiatan pengelolaan hasil olahan ikan yang sudah ada di Kabupaten Bojonegoro. Berbagai produk olahan yang sudah ada dan mulai dikembangkan, seperti bakso dan nugget ikan. Diharapkan mampu untuk lebih bisa dikembangkan lagi melalui kegiatan penyuluhan serta pengawasan produk yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk melihat, memperhatikan serta mengontrol kualitas produk yang dihasilkan oleh setiap kelompok pengolah dan pemanfaatan hasil perikanan di Kabupaten Bojonegoro. Harapannya dengan adanya kualitas produk yang lebih baik, akan mampu meningkatkan permintaan produk olahan ikan sebagai penunjang perekonomian masyarakat kelompok pengolah dan pemanfaatan hasil perikanan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu diharapkan pula untuk kedepannya jumlah

kelompok pengolah dan pemanfaatan hasil perikanan di Kabupaten Bojonegoro bisa lebih meningkat, sebagai upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian masyarakat di Bojonegoro yang secara tidak langsung akan berdampak pada pembangunan daerah di Bojonegoro.

D. Penerapan sistem Rantai Dingin dan Sanitas *Hygine*

Kegiatan penerapan sistem rantai dingin dan sanitas *hygine* secara umum bertujuan untuk pengoptimalan kegiatan pemasaran produk hasil perikanan. Dalam kegiatan ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro menyediakan serta memberikan bantuan sarana penyimpanan produk olahan berupa *cool box* kepada setiap kelompok pengolah dan pemanfaatan hasil perikanan di Kabupaten Bojonegoro, agar produk yang mereka hasilkan dapat disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama dengan terjaganya kualitas produk yang dimilikinya. Selain itu dalam kegiatan ini juga akan dilakukan pengawasan serta pengontrolan kepada setiap kelompok pengolah dan pemanfaatan hasil perikanan dalam hal pengelolaan limbah hasil produksi sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.

E. Penyedia Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemasaran ikan secara umum dimaksudkan untuk memberikan fasilitas baik kepada para pembudidaya, nelayan, maupun kelompok pengolah untuk menunjang kegiatan pemasaran ikan maupun produk olahannya kepada para konsumen. Dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang telah mengelola 2 pasar ikan, tepatnya yang ada di Kecamatan Baureno dan Kalitidu sebagai salah satu penunjang kegiatan pemasaran disana, berupaya untuk lebih bisa mengoptimalkan fungsinya kembali yang mana selama ini kedua pasar ikan tersebut masih berjalan kurang efektif dan maksimal dilihat dari banyaknya lapak pedagang yang terlihat kosong.

2. Pengembangan Perikanan Tangkap

Program pengembangan perikanan tangkap merupakan sebuah program kebijakan yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kegiatan penangkapan ikan di seluruh kawasan Bojonegoro melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penangkapan oleh nelayan di Kabupaten Bojonegoro agar kegiatan penangkapan ikan bisa lebih optimal. Di dalam program pengembangan perikanan tangkap terdapat 2 kegiatan yang menjadi strategi kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, 2 kegiatan tersebut antara lain:

A. Pengkayaan Sumberdaya Ikan

Kegiatan pengkayaan sumberdaya ikan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro secara umum bertujuan untuk memperkaya stok sumberdaya ikan yang ada di seluruh perairan umum baik sungai, embung, rawa serta waduk yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai penunjang perekonomian seluruh kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jenis ikan yang biasa di sebar di seluruh perairan umum di kawasan Bojonegoro meliputi jenis ikan nila, tawes serta trombo. Tingkat penyebaran disetiap embung dan waduk berkisar antara 6.000-10.000 bibit ikan dari ketiga jenis ikan tersebut yang dibagi secara rata, hal ini tergantung luasan embung maupun waduk yang akan diisi.

B. Stimulasi Alat Bantu Tangkap

Kegiatan stimulasi alat bantu penangkapan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro secara umum bertujuan untuk mengembangkan perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bojonegoro melalui peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, terutama melalui peningkatan teknologi alat bantu penangkapan ikan yang digunakan oleh seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Secara umum kegiatan ini mengacu

pada program DKP Provinsi Jawa Timur sebagai upaya peningkatan perikanan tangkap. Aplikasi dari kegiatan ini adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro sebagai mediator dari DKP Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti jarring tebar, jarring insang (*gill net*), pancing berjoran dan bubu untuk disalurkan kepada seluruh kelompok nelayan yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

3. Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan

Program pengembangan perikanan budidaya dan kawasan minapolitan merupakan sebuah program kebijakan yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan serta mengoptimalkan kegiatan budidaya ikan baik yang berada di kolam, sawah tambak, mina padi, dan juga yang dilakukan didalam jaring apung di seluruh kawasan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga untuk mengembangkan kawasan minapolitan yang menjadi kebijakan menteri Perikanan tahun 2009 untuk membentuk suatu kawasan yang ada dilingkup sebuah daerah, menjadi suatu pusat kegiatan perikanan yang tersistem mulai kegiatan produksi hingga pemasaran yang mampu menjadikan sumber perekonomian dan pendapatan utama masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut. Untuk mencapai tujuan diatas di dalam program pengembangan perikanan budidaya dan kawasan minapolitan terdapat 7 kegiatan yang menjadi strategi kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bojonegoro, 7 kegiatan tersebut antara lain:

A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan

Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro secara umum dimaksudkan untuk pengembangan kawasan minapolitan yang mulai

dirintis, sebagai penunjang perekonomian masyarakat dikawasan tersebut. Sarana dan prasarana disediakan kepada para kelompok pembudidaya ikan yang ada pada daerah sasaran, sarana dan prasarana yang disediakan meliputi fasilitas kolam pasangan yang terbuat dari batu bata atau sering disebut corcoran ,benih ikan lele, serta pakan ikan.

B. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan pada intinya merupakan sebuah kegiatan penyuluhan yang secara umum ditujukan kepada seluruh kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu di dalam meningkatkan kualitas mereka didalam mengelola serta mengembangkan sektor sektor perikanan yang mereka kelola melalui alternatif strategi maupun teknologi terbaru yang mampu menunjang efesiensi serta efektifitas kegiatan mereka.

C. Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Kegiatan pendampingan kelompok tani pemdudidaya ikan pada intinya merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan langsung kepada para kelompok pembudidaya ikan yang tersebar diseluruh Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan budidaya yang mereka lakukan bisa berjalan dengan baik melalui penjelasan terkait teknis atas fasilitas ataupun sarana dan prasarana dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang diberikan kepada mereka, agar fasilitas ataupun sarana dan prasarana tersebut bisa sampai tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan serta diaplikasikan secara maksimal oleh mereka.

D. Anty Proverty Program (APP)

Anty proverty program (APP) adalah sebuah kegiatan yang diusung oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan program dari pemerintah pusat untuk mengetaskan kemiskinan yang kini masih terjadi

di Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas serta pendampingan secara menyeluruh terhadap kelompok atau golongan masyarakat yang dipandang kurang mampu didalam perekonomiannya yang masuk dalam kluster atau dasil 2. Dalam program ini mereka akan diberikan berupa fasilitas paket kolam, benih, pakan, serta obat obatan secara gratis. Harapannya nanti hal ini mampu mereka kelola dengan baik sebagai sumber penghasilan mereka agar mampu meningkatkan taraf perekonomian mereka.

E. Pengembangan Sistem Pemanfaatan Lahan

Kegiatan pengembangan sistem pemanfaatan lahan pada initnya dimaksudkan untuk memberikan program penyuluhan kepada masyarakat kelompok pembudidaya ikan terkait pengembangan kolam pekarangan sebagai sarana budidaya ikan agar kegiatan budidaya yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak melalui penambahan jumlah kolam yang mereka miliki dalam melakukan kegiatan budidaya ikan.

F. Pengembangan Pakan Mandiri

Kegiatan pengembangan pakan mandiri merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro di dalam mensiasati fluktuasi yang tidak menentu dari harga pakan ikan yang kini beredar dipasaran. Dalam hal ini Dinas peternakan dan perikanan akan memberikan fasilitas mesin pembuat pakan kepada kelompok pembudidaya ikan yang ada di kawasan Kabupaten Bojonegoro yang dianggap sudah mulai berkembang dengan baik, serta memberikan penyuluhan terkait teknis dan komposisi pakan yang bernutrisi sebagai substitusi atau pengganti pakan utama dari pabrik. Semua itu harapannya agar biaya produksi yang mereka keluarkan, khususnya untuk pakan bisa mereka minimalisir melalui pembuatan pakan alternatif

sehingga keuntungan yang mereka dapatkan didalam penjualan hasil ikan bisa lebih besar.

G. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul merupakan fasilitas yang diberikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, di dalam penyediaan benih ikan unggul dari jenis ikan lele kepada seluruh kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bojonegoro. Aplikasinya Dinas Peternakan dan Perikanan akan melakukan persilangan indukan ikan lele yang berkualitas dengan harapan akan mampu menciptakan kualitas benih ikan unggul yang mudah di dalam cara pengelolaannya. Selain itu diharapkan dengan adanya kegiatan ini secara tidak langsung juga akan membuat masyarakat melihat kegiatan atau usaha pembenihan ikan sebagai alternatif penunjang perekonomian mereka dan mampu berkontribusi didalam meningkatkan ketersediaan stok benih ikan di Kabupaten Bojonegoro kepada seluruh kelompok pembudidaya ikan.

Pelaksanaan rencana strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, dalam setiap tahun sendiri akan selalu dievaluasi dengan melihat serta mengitung kinerja yang dicapai dari setiap kegiatan yang tercantum dalam renstra. Untuk menghitung ketercapaian kinerja SPKD dalam setiap tahun, Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Bojonegoro menetapkan sebuah formula indikator didalam melihat hal tersebut. Adapun formula indikator yang dibentuk adalah:

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Produksi tahun } n - \text{tahun } n-1}{\text{Jumlah Produksi tahun } n-1} \times 100\%$$

Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja SPKD Pada Renstra Disnakan Kab. Bojonegoro (2014-2018)

TAHUN	Perikanan Tangkap (ton)	Pencapaian Kinerja SPKD tahun n (%)	Perikanan Budidaya (ton)	Pencapaian Kinerja SPKD tahun n (%)	Total Produksi (ton)	Pencapaian Kinerja SPKD tahun n (%)
2014	898.5	0	2765.7	0	3664.2	0
2015	908.82	1,15	3315.9	19,8	4224.72	15,27

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro (2016)

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa ketercapaian kinerja SPKD Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Bojonegoro terhadap renstra Disnakan tahun 2014-2015, untuk perikanan tangkap pada tahun 2015 hanya mencapai 1,15 %. Hal ini disebabkan karena ada salah satu kegiatan didalam program pengembangan perikanan tangkap yaitu kegiatan stimulasi alat bantu penangkapan dalam 2 tahun terakhir belum terlaksana, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berpacu pada program DKP Provinsi Jawa Timur didalam memberikan bantuan alat tangkap ke kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Provinsi Jawa Timur untuk didistribusikan ke kelompok nelayan di daerahnya masing-masing. Untuk Perikanan Budidaya sendiri, ketercapaian kinerja SPKD sudah tinggi dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk ketercapain kinerja SPKD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 sendiri terkait perkembangan perikanan di segala sektor di Kabupaten Bojonegoro mencapai 15,27 %.

4.4 Kontibusi Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro

Keberadaan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap alternatif perekonomian masyarakat di daerahnya. Hal inilah yang menjadikan salah satu alasan bahwa sektor

perikanan perlu dipertahankan dan terus untuk dikembangkan mengingat adanya potensi yang sebenarnya dimiliki Kabupaten Bojonegoro untuk mengelola sektor perikanan yang ada di daerahnya untuk menjadi lebih baik.

Sebuah evaluasi sangat diperlukan oleh sebuah daerah sebagai referensi untuk melihat target yang telah dicapai didalam melakukan sebuah hal dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini dengan melihat PAD sektor perikanan Kabupaten Bojonegoro yang kemudian dibandingkan dengan PAD keseluruhan sektor yang ada dapat membantu didalam melihat seberapa besar kontribusi yang telah dicapai oleh sektor perikanan dalam kontribusinya untuk pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Data yang di olah, adalah data yang sebelumnya dihimpun dari data tahunan Dinas Pendapatan dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Adapun nilai kontibusi sektor perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro

No	Tahun	PAD Sektor Perikanan	PAD keseluruhan Sektor	Prosentase Kontribusi Perikanan (%)
1	2014	Rp. 15.000.000,00	Rp. 291.000.000.000,00	0,0051
2	2015	Rp. 20.000.000,00	Rp. 341.087.000.000,00	0,0058

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro (2016)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan prosentase dari kontribusi yang diberikan sektor perikanan terhadap PAD keseluruhan sektor yang ada di Kabupaten Bojonegoro dalam periode 2 tahun masa berjalannya Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 0,0007 %. Sementara ini PAD yang diberikan oleh sektor perikanan hanya di

dapatkan dari penjualan benih di BBI Mojoranu yang berada di Kecamatan Dander dan BBI Ngampal di Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro.

Meskipun untuk saat ini kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan bisa dilihat masih sangat kecil, tapi bukan berarti sektor ini tidak bisa menjadi sektor yang mampu untuk terus dikembangkan dalam upaya peningkatan kontribusinya dalam pembangunan daerah, mengingat adanya peningkatan nilai kontribusi yang diberikan sektor perikanan di tahun 2015. Meskipun nantinya dalam hal ini usaha usaha perikanan yang ada, belum bisa memberikan kontribusinya secara nyata terhadap pembangunan daerah namun usaha perikanan dapat digunakan pemerintah sebagai dasar kebijakan alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bojonegoro didalam mengentaskan nilai kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bojonegoro.

4.5 Wilayah Basis Perikanan

Salah satu upaya di dalam memperoleh perencanaan yang baik dan tetap sasaran di dalam melakukan suatu pengembangan pada sebuah sektor tertentu. Perlu adanya sebuah analisa yang bisa membantu didalam menentukan sebuah lokasi yang strategis serta tepat sasaran terhadap program yang ingin dilakukan di dalam upaya pengembangan sebuah sektor terkait.

Metode analisa *Location Quotient* merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah lokasi basis dan non basis terhadap sebuah sektor yang ada di daerah tertentu untuk dilakukan sebuah pengembangan melalui berbagai program yang telah ditentukan. Menurut Tumada (2012), lokasi basis adalah sebuah lokasi yang memiliki potensi lebih terhadap sebuah sektor yang dia miliki untuk memenuhi permintaan pasar didalam lokasi itu sendiri dan juga lokasi lain yang ada diluar lokasi tersebut, sedangkan lokasi non basis adalah sebuah lokasi yang disitu hanya mampu

menyediakan sebuah sektor yang dia miliki untuk dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di lokasi tersebut.

Analisa *Location Quotient* di dalam penentuan wilayah basis perikanan tangkap dan budidaya dalam hal ini, diseluruh kawasan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, menggunakan besaran jumlah produksi total (ton) ikan yang dihasilkan dari kegiatan penangkapan maupun budidaya disetiap Kecamatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Setelah itu akan dilakukan perbandingan antara jumlah total produksi (ton) ikan yang dihasilkan dari kegiatan penangkapan maupun budidaya secara keseluruhan di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Data 5 tahun digunakan untuk menghindari bias terhadap penelitian ini karena jumlah produksi perikanan disuatu wilayah sangat tergantung pada musim.

Menurut Hilmayati (2013), apabila nilai LQ yang diperoleh dari sebuah kecamatan <1 maka kecamatan tersebut tergolong dalam lokasi basis baik itu penangkapan ataupun budidaya. Untuk nilai perhitungan LQ didalam penentuan wilayah basis penangkapan dan budidaya di seluruh kawasan Bojonegoro bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.1 Grafik LQ Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015

Dilihat dari hasil perhitungan nilai LQ perikanan tangkap di setiap Kecamatan di kawasan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2011-2015 dapat dilihat bahwa terdapat 9 Kecamatan yang memiliki besaran nilai LQ <1. Hal ini menunjukkan bahwa 9 Kecamatan tersebut memiliki potensi di perikanan tangkap lebih besar daripada perikanan budidayanya. Sehingga, dalam pengambilan keputusan pelaksanaan sebuah program yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan perikanan tangkap, dapat difokuskan di 9 Kecamatan tersebut. Kegiatan penangkapan ikan sendiri didapatkan oleh nelayan dari kegiatan penangkapan yang dilakukan di perairan umum yang meliputi embung, waduk, rawa dan aliran sungai yang ada di kecamatan tersebut. Adapun 9 Kecamatan tersebut berdasarkan perolehan nilai LQ tertinggisecara berurutan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.2 Grafik LQ Wilayah Basis Perikanan Tangkap

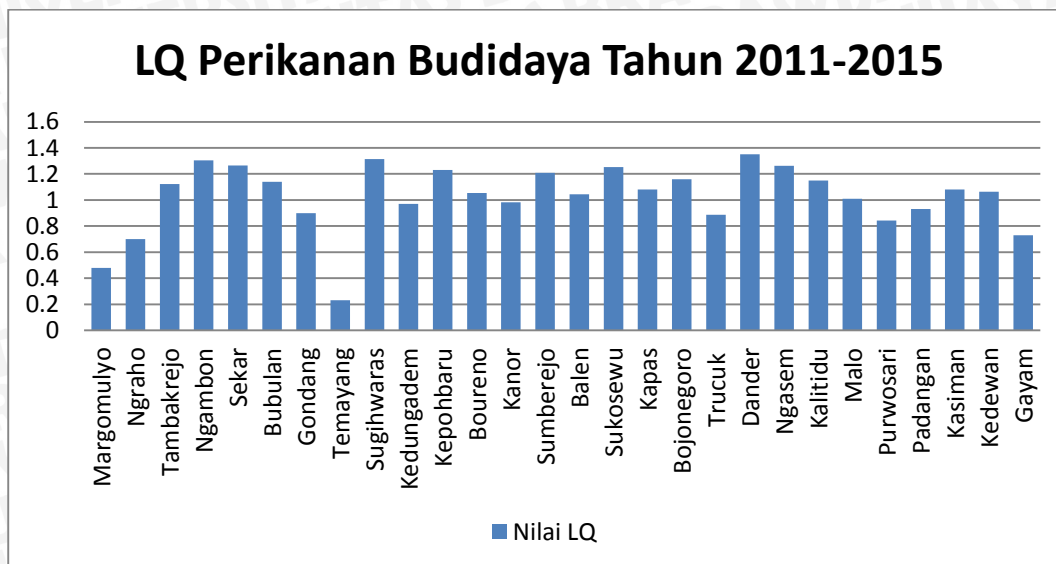
Gambar 4.2 menyatakan bahwa Kecamatan Temayang menjadi Kecamatan yang memiliki besaran nilai LQ terhadap sektor penangkapan paling tinggi yaitu 3,206. Hal ini di karenakan adanya sebuah waduk terbesar di Bojonegoro yang berada di Kecamatan tersebut yang menjadi pusat penyebaran sumberdaya ikan di Kabupaten Bojonegoro untuk dimanfaatkan.

Sehingga, pada penelitian ini Kecamatan Temayang terpilih menjadi kecamatan prioritas yang perlu dikembangkan terlebih dahulu dibanding kecamatan lain yang juga memiliki nilai LQ <1 di sektor perikanan tangkap. Hal ini sesuai dengan pendapat Pangerang (2014) bahwa Nilai LQ yang lebih tinggi menunjukkan keunggulan komparatif yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan nilai LQ yang lebih rendah.

Secara umum alat tangkap yang digunakan nelayan di Kecamatan Temayang untuk mendapatkan hasil tangkapannya adalah jenis alat tangkap jarring tebar dan jarring insang. Sedangkan ikan hasil tangkapan nelayan umumnya adalah jenis ikan Tawes dan Nila.

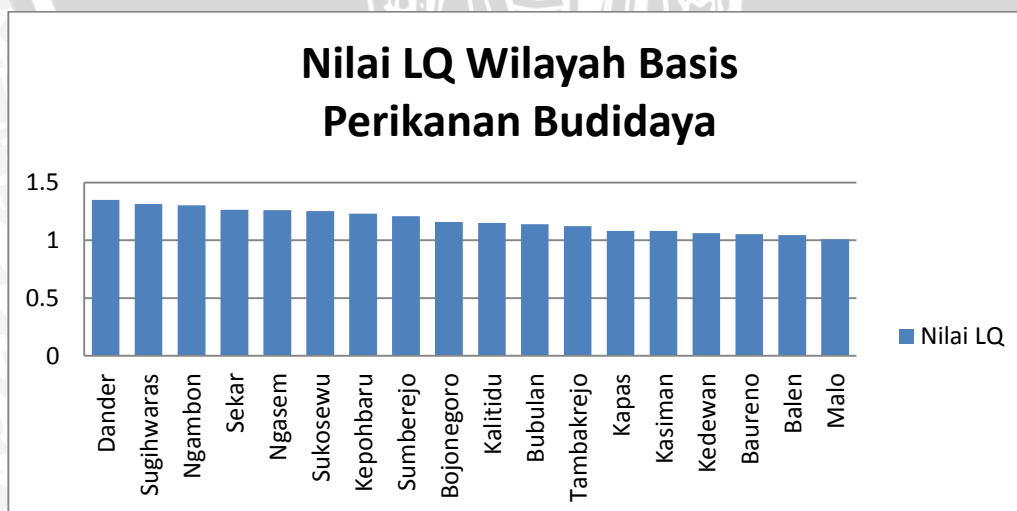


Gambar 4.3 Wilayah Basis Perikanan Tangkap Terpilih



Gambar 4.4 Grafik LQ Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015

Dilihat dari hasil perhitungan nilai LQ budidaya di setiap Kecamatan di kawasan Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2011-2015, ada 18 Kecamatan yang memiliki nilai LQ < 1. Hal ini menunjukkan bahwa 18 Kecamatan tersebut memiliki potensi di perikanan budidaya lebih besar daripada perikanan tangkapnya. Sehingga, dalam pengambilan keputusan pelaksanaan sebuah program yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan budidaya, dapat difokuskan di 18 Kecamatan tersebut. Adapun 18 Kecamatan tersebut berdasarkan perolehan nilai LQ tertinggi secara berurutan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.5 Grafik Nilai LQ Wilayah Basis Perikanan Budidaya

Gambar 4.5 menyatakan bahwa Kecamatan Dander menjadi Kecamatan yang memiliki besaran nilai LQ perikanan budidaya terbesar yaitu 1,35. Hal ini dikarenakan letak geografis Kecamatan Dander yang cukup mendukung untuk dilakukan kegiatan budidaya ikan disana. Mulai dari stok sumberdaya air yang cukup melimpah dengan terdapatnya beberapa sumber mata air, sebagai media utama bagi masyarakat untuk membudidayakan ikan. Dan juga adanya salah satu Balai Benih Ikan yang menjadi pusat penyetok benih ikan bagi para pelaku kelompok pembudidaya ikan disana.

Sehingga, pada penelitian ini Kecamatan Dander terpilih menjadi kecamatan prioritas yang perlu dikembangkan terlebih dahulu dibanding kecamatan lain yang juga memiliki nilai LQ <1 di sektor perikanan budidaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pangerang (2014) bahwa Nilai LQ yang lebih tinggi menunjukkan keunggulan komparatif yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan nilai LQ yang lebih rendah.

Umumnya kelompok pembudidaya di Kecamatan Dander memanfaatkan lahan pekarangan yang ada dirumahnya untuk dijadikan sebuah kolam pembudidaya. Namun juga terdapat pembudidaya yang menggunakan sistem budidaya mina padi meskipun jumlahnya masih sangat kecil. Jenis ikan yang biasa dibudidayakan oleh kelompok pembudidaya di Kecamatan Dander adalah jenis ikan lele dan nila.



4.6 Wilayah Basis Perikanan Budidaya Terpilih

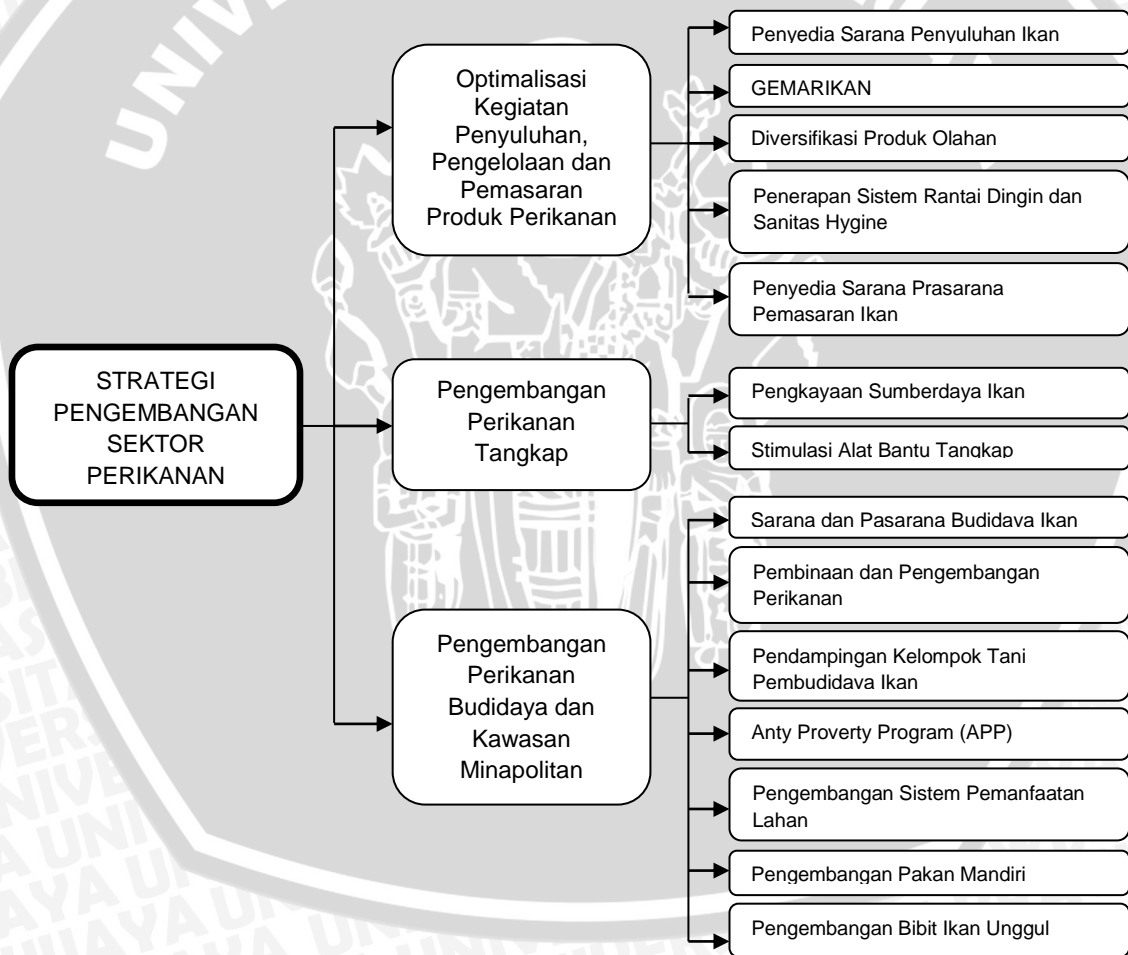
4.6 Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan

Penentuan strategi prioritas pengembangan sektor perikanan pada penelitian ini berpedoman pada rencana strategi jangka menengah yang telah dirumuskan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro untuk tahun perencanaan 2014-2018. Dalam pelaksanaannya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro telah memiliki total 14 kegiatan yang mana akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun sekali dalam kurun waktu 5 tahun masa kerja.

Pada penelitian ini metode AHP digunakan untuk menentukan strategi prioritas dalam pengembangan sektor perikanan yang telah tersedia dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Menurut Tumada (2012), tahapan awal dari penggunaan metode AHP adalah setelah mendefinisikan masalah dan menentukan solusinya, akan dilakukan penyusunan sebuah hirarki. Pada penelitian ini hirarki yang terbentuk melihat 3 program dan 14 kegiatan yang telah tersedia dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Adapun dalam hirarki ini terdapat 2 level yang terbentuk. Level pertama berisi macam-macam program yang bersifat lebih

umum dan level kedua berisi macam-macam kegiatan yang sifatnya lebih khusus. Hal ini sesuai dengan pendapat Saaty (1980) dalam Tumada (2012), bahwa dalam penyusunan sebuah hirarki pada metode AHP setiap kriteria atau level yang terbentuk tersusun sesuai tingkatan tujuan dalam sebuah model.

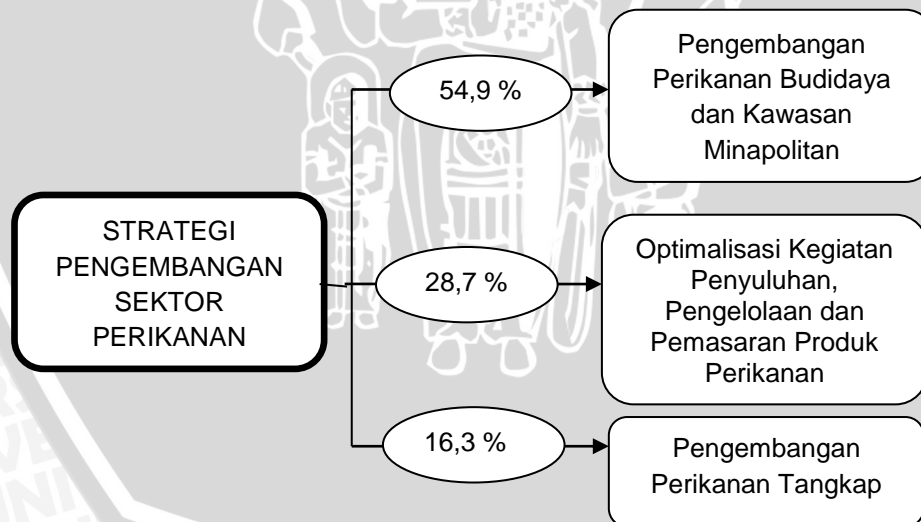
Maksud dari penyusunan hirarki ini sendiri adalah untuk mempermudah di dalam melakukan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan umum yaitu untuk menentukan prioritas strategi yang akan dilakukan sebagai upaya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro. Adapun bentuk hirarki pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.7 Hirarki Strategi Pengembangan Sektor Perikanan di Bojonegoro
 Sumber: Data Sekunder di olah Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro (2016)

4.7 Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (Level Pertama)

Strategi prioritas pengembangan sektor perikanan level pertama berisikan program-program yang telah tercantum dalam renstra yang sifatnya lebih umum dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan utama yaitu strategi pengembangan sektor perikanan. Seperti halnya telah dijelaskan diatas bahwasanya pada penelitian ini terdapat 4 responden yang digunakan, dengan tujuan untuk memberikan pendapatnya masing masing terhadap renstra yang telah mereka susun. Setelah kuisisioner yang terisi dan terhimpun kemudian untuk membantu didalam melakukan pengolahan data dengan tujuan menentukan strategi prioritas pengembangan digunakan menggunakan aplikasi *Expert Choice* 11. Aplikasi ini digunakan dengan maksud untuk mempermudah peneliti didalam menentukan strategi prioritas pengembangan sektor perikanan secara benar dan tepat. Adapun hasil analisis menunjukkan penilaian sebagai berikut:



Gambar 4.8 Pembobotan Nilai Strategi Pengembangan Sektor Perikanan di Bojonegoro
Sumber: Data Primer di olah (*Expert Choice* 11)

Dari hasil analisis menggunakan aplikasi *expert choice* 11, melalui penggabungan penilaian 4 responden. Program pengembangan perikanan

budidaya dan kawasan minapolitan menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro dengan nilai 54,9 %, kemudian prioritas selanjutnya adalah program optimalisasi kegiatan penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran produk perikanan dengan nilai 28,7 %, dan program pengembangan perikanan tangkap menduduki prioritas ketiga dengan nilai 16,3 %. Dari penggabungan penilaian yang diberikan oleh setiap responden pada penelitian ini, diperoleh nilai *inconsistency* sebesar 0,06, hal ini menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh ke empat responden adalah konsisten. Sesuai dengan pendapat Tumada (2012), bahwa penilaian yang dilakukan oleh responden menggunakan metode AHP agar dapat diterima, maka nilai *inconsistency* dari responden adalah tidak lebih besar dari 0,1.

Program pengembangan budidaya dan kawasan minapolitan yang terpilih menjadi strategi prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu, sangat sejalan dengan keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro saat ini. Dimana kegiatan budidaya merupakan kegiatan perikanan utama di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang telah memberikan kontribusi hasil produksinya paling besar terhadap sektor perikanan di Bojonegoro apabila dibandingkan dengan sektor penangkapan. Selain itu didalam pengembangan budidaya perikanan sangat diperlukan sebuah kebijakan seperti pembuatan sebuah kawasan minapolitan untuk mendukung kegiatan perikanan. Hal ini harapannya mampu memfokuskan kegiatan perikanan yang tersistem pada satu titik lokasi sehingga mempermudah didalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan budidaya di kawasan Bojonegoro dengan harapan mampu menjadikan sektor perikanan bisa lebih berkembang secara optimal. Untuk perbandingan sektor budidaya dan penangkapan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Nilai Kontribusi Perbandingan Sektor Budidaya dan Penangkapan

No	Tahun	Kontribusi Sektor Budidaya (Ton)	Kontribusi Sektor Penangkapan (Ton)
1	2011	65,1 %	34,9 %
2	2012	71,3 %	28,7 %
3	2013	72,2 %	27,8 %
4	2014	75,2 %	24,8 %
5	2015	78,5 %	21,5 %

Sumber: Data Sekunder diolah
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro (2016)

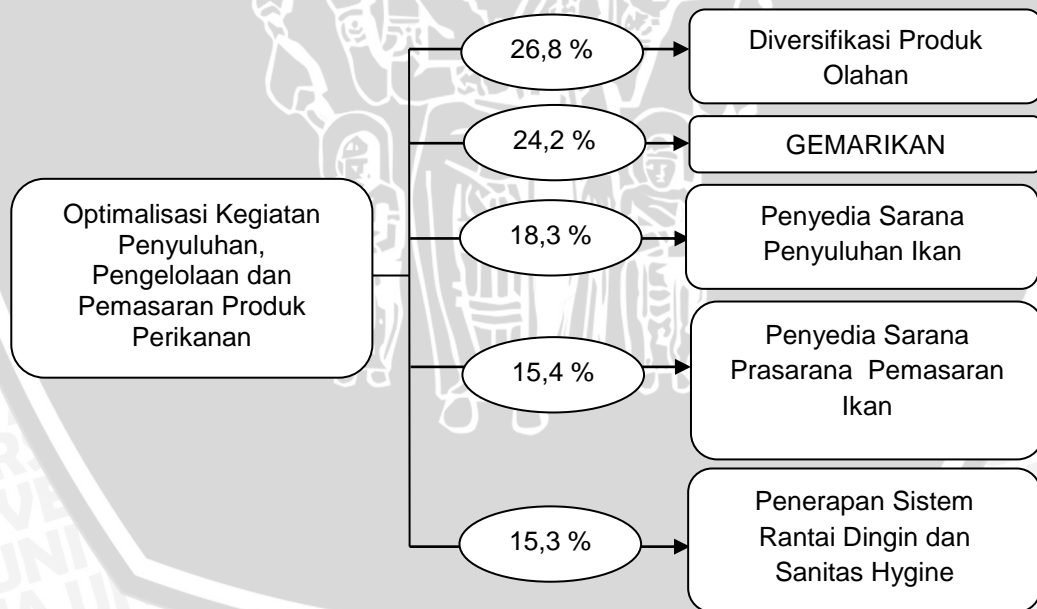
Program Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan dipilih menjadi prioritas program kedua yang perlu dilaksanakan, mengingat dalam program ini terdapat beberapa kegiatan yang mana sangat diperlukan dalam optimalisasi kegiatan pengelolaan dan pemasaran produk perikanan yang mulai berkembang disana. Harapannya dengan adanya program ini mampu untuk menjadikan media bagi masyarakat di dalam meningkatkan kualitas mereka didalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pemasaran produk mereka.

Program pengembangan perikanan tangkap menjadi prioritas program terakhir dari ketiga program yang ada, mengingat seperti dijelaskan diatas bahwa basis kegiatan perikanan di Kabupaten Bojonegoro masih berada pada kegiatan budidaya ikan. Kegiatan penangkapan sendiri masih sangat tergantung pada jumlah sebaran benih yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan di kawasan Bojonegoro, mengingat tidak adanya laut sebagai sumber utama kegiatan penangkapan ikan pada umumnya.

4.8 Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (Level Kedua)

Setiap Program yang ada pada renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro khususnya untuk sektor perikanan terdapat berbagai kegiatan dari setiap program yang telah ada. Dalam analisa strategi prioritas level kedua ini dimaksudkan untuk mengetahui prioritas kegiatan yang terdapat dalam setiap program yang telah tersedia. Analisa ini tetap menggunakan metode AHP dengan bantuan aplikasi pengolahan data *Expert Choice 11*. Adapun hasil perhitungan menggunakan aplikasi *Expert Choice 11* didapatkan prioritas dari setiap kegiatan yang tertera dalam 3 program yang telah ada menurut penggabungan penilaian dari setiap responden.

A. Program Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

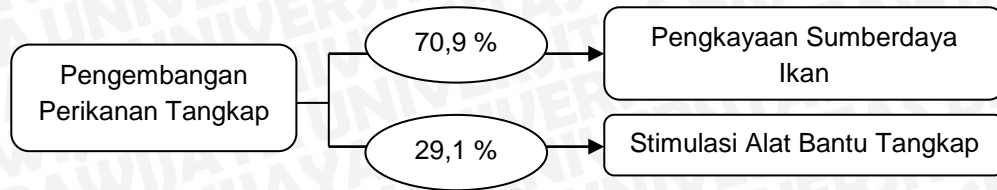


Gambar 4.9 Pembobotan Nilai Program Optimalisasi Penyuluhan, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan
Sumber: Data Primer di Olah (*Expert Choice 11*)

Kegiatan diversifikasi produk olahan menurut penggabungan penilaian dari 4 responden memperoleh nilai terbesar yaitu 26,8 %. Hal ini sangat sesuai dengan keadaan lapang, dimana produksi ikan di Kabupaten Bojonegoro yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Untuk meningkatkan nilai tambah dari produk perikanan yang terus meningkat perlu adanya sebuah inisiatif dari para pelaku usaha terutama pengolahan produk olahan ikan di Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan variasi produk olahannya. Dengan tujuan hal ini mampu memberikan nilai jual produk perikanan menjadi lebih tinggi, dengan harapan mampu memberikan alternatif pendapatan yang lebih menjanjikan bagi para pelaku usaha khususnya kelompok pengolahan produk perikanan dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada umumnya.

Kegiatan penerapan sistem rantai dingin dan *sanitas hygiene* menjadi prioritas kegiatan terakhir dalam program ini, dengan memperoleh nilai sebesar 15,3 %. Hal ini sesuai dengan keadaan lapang dimana jumlah kelompok pengolahan hasil perikanan di Bojonegoro yang masih sedikit dan memiliki skala produksi yang masih kecil, sehingga penerapan sistem ini dipandang kurang begitu mendesak. Selain itu menurut kajian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro masih belum menemukan masalah yang timbul akibat limbah yang disebabkan kegiatan pengolahan hasil perikanan. Namun bukan berarti dengan hal ini, kegiatan tersebut dianggap tidak begitu penting untuk dilakukan, melainkan dengan adanya kegiatan ini dilakukan dalam setiap tahunnya, harapanya dapat mencegah masalah-masalah yang bisa timbul akibat kegiatan yang berkaitan dengan perikanan terutama pengolahan hasil perikanan.

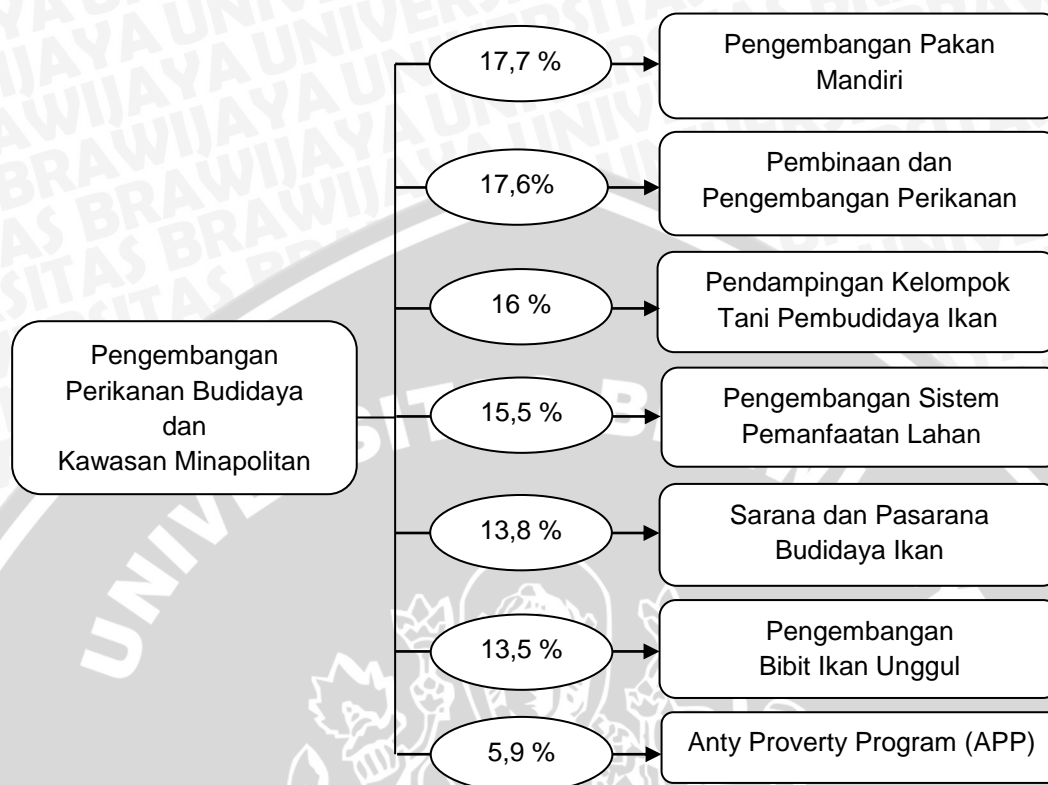
B. Program Pengembangan Perikanan Tangkap



Gambar 4.10 Pembobotan Nilai Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Sumber: Data Primer di olah (*Expert Choice 11*)

Kegiatan pengkayaan sumberdaya ikan menjadi prioritas utama dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan perolehan nilai sebesar 70,9 %, hal ini mengingat kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Bojonegoro masih sangat tergantung pada tingkat penyebaran jumlah benih ikan di setiap waduk dan embung, yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Perikanan. Hal ini dikarenakan di Bojonegoro sendiri kegiatan penangkapan hanya terfokuskan di area waduk, embung, rawa serta sungai yang mengalir di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga kegiatan ini dianggap penting agar kegiatan penangkapan perikanan di Kabupaten Bojonegoro bisa tetap berjalan dan mampu memberikan pendapatan bagi para pelaku usaha penangkapan ikan diseluruh Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu Kegiatan Stimulasi Alat Bantu Tangkap sendiri menjadi prioritas selanjutnya dengan memperoleh nilai 29,1 %, hal ini mengingat kegiatan ini masih sangat tergantung pada fasilitas yang diberikan DKP Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, yang kemudian barulah akan di distribusikan serta diberikan pembekalan tentang stimulasi alat bantu penangkapan kepada setiap kelompok pelaku usaha penangkapan ikan diseluruh Kabupaten Bojonegoro.

C. Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan



Gambar 4.11 Pembobotan Nilai Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan
Sumber: Data Primer di olah (*Expert Choice 11*)

Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan yang pada sub bab sebelumnya dipilih menjadi prioritas program utama yang akan dilakukan, memiliki jumlah kegiatan terbanyak dibanding dengan kedua program yang lain. Setelah dilakukan analisis melalui penggabungan penilaian dari setiap responden didapatkan hasil bahwa kegiatan pengembangan pakan mandiri menjadi prioritas utama dengan memperoleh nilai sebesar 17,7 %, hal ini sangat sejalan dengan keadaan lapang bahwa, terjadinya fluktuasi harga pakan ikan yang tidak menentu sering kali membuat sebagian besar pelaku budidaya ikan di Bojonegoro menjadi kebingungan menghadapi permasalahan tersebut, yang mana hal ini bisa menjadikan biaya produksi yang mereka keluarkan khususnya untuk biaya pakan jadi membengkak dan efeknya, keuntungan yang

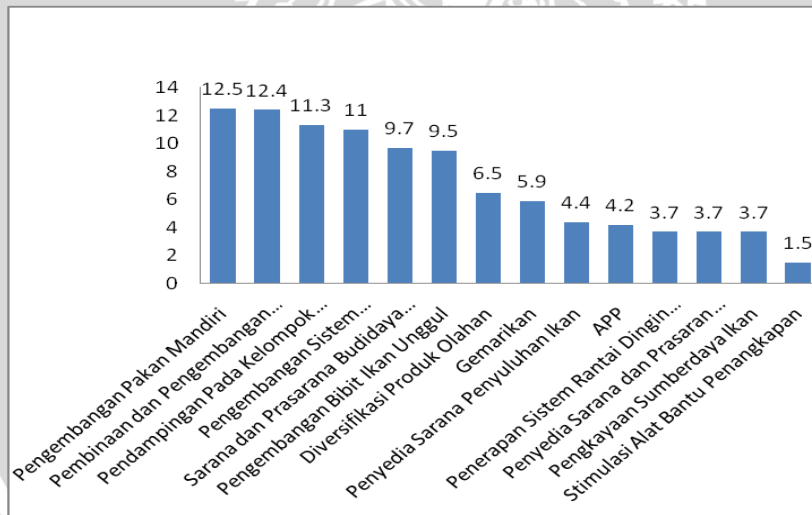
mereka peroleh akan berkurang. Mengingat juga kegiatan budidaya ikan yang mulai masuk dalam fase perkembangan di Bojonegoro, sehingga dengan adanya permasalahan ini sering kali akhirnya membuat para pelaku usaha budidaya ikan beralih dan meninggalkan usaha mereka yang secara tidak langsung akan membuat kontribusi total produksi ikan menjadi menurun. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan membuat sebuah kegiatan yang harapannya mampu membantu didalam memecahkan permasalahan tersebut, melalui kegiatan pengembangan pakan mandiri terhadap setiap kelompok pembudidaya ikan, agar mampu membantu didalam meminimalisir biaya produksi yang mereka keluarkan khususnya untuk biaya pakan.

Kegiatan *Anty Proverty Program* terpilih menjadi prioritas kegiatan dari Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Pengembangan Kawasan Minapolitan paling akhir, dengan hanya mendapatkan nilai sebesar 5,9 %, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut hanyalah merupakan sebuah program yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap dinas terkait untuk membantu memberikan kontribusunya di dalam upaya menyukseskan program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia dengan memberikan bantuan dan juga fasilitas kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu dari segi ekonominya. Sehingga dilihat, kegiatan ini kurang mengarah pada tujuan utama didalam renstra untuk meningkatkan serta mengembangkan sektor perikanan yang telah ada di Kabupaten Bojonegoro. Barulah ketika nanti semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan dilakukan, kegiatan *anty proverty program* akan dilakukan sebagai bentuk kontribusi Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro untuk membantu didalam pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Dengan harapan nantinya untuk bisa bersama-sama dalam membangun sektor perikanan di kawasan

Kabupaten Bojonegoro melalui fasilitas yang diberikan secara gratis untuk mereka.

4.9 Penilaian Bobot Akhir Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro

Penilaian bobot akhir dilakukan untuk menentukan strategi prioritas pengembangan sektor perikanan di Bojonegoro, melalui 14 kegiatan dan sudah terbagi dalam 3 program yang tercantum dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018. Pengolahan data dengan melakukan penggabungan penilaian dari 4 responden, dilakukan menggunakan bantuan aplikasi *expert choice* 11. Adapun hasil dari perhitungan bobot akhir strategi prioritas pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.12 Bobot Nilai Akhir Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan
Sumber: Data Primer di olah (*Expert Choice* 11)

Hasil perolehan nilai bobot akhir dari setiap penilaian kegiatan yang di gabungkan melalui penilaian dari setiap program yang ada, diperoleh nilai *inconsistency* sebesar 0,03. Menurut Tumada (2012), bahwa penilaian yang dilakukan oleh responden menggunakan metode AHP agar dapat diterima, maka

nilai *inconsistency* dari responden adalah tidak lebih besar dari 0,1. Maka hal ini menunjukkan bahwa penilaian bobot akhir yang dilakukan oleh ke empat responden adalah konsisten, sehingga hasil penilaian bisa diterima.

Pada penilaian bobot akhir kegiatan pengembangan pakan mandiri dalam Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 12,5 %, hal ini sejalan dengan keadaan di lapang, mengingat kegiatan budidaya perikanan di Bojonegoro yang masuk dalam kategori berkembang apabila tidak diimbangi dengan suatu kebijakan yang tepat, untuk mampu mempertahankan eksistensi sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro, maka akan membuat sektor ini menjadi terkesampingkan. Hal ini juga sejalan dengan keadaan dimana fluktuasi harga pakan yang sering terjadi, mengakibatkan para pelaku usaha pembudidaya ikan menjadi merasa berat karena hal itu dapat menjadikan keuntungan mereka menjadi sedikit atau bahkan mengalami kerugian karena biaya produksi yang mereka keluarkan terutama untuk pakan lebih tinggi dari pendapatan yang mereka peroleh.

Sementara kegiatan stimulasi alat bantu penangkapan ikan dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap menjadi prioritas kegiatan yang paling akhir untuk dilakukan dengan perolehan nilai sebesar 1,5 %. Hal ini sejalan dengan keadaan lapang, mengingat kegiatan perikanan tangkap di Bojonegoro sendiri masih sangat tergantung dari *restcoking* sumberdaya perikanan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro di beberapa waduk serta embung yang ada disana, sehingga potensi untuk pengembangannya sendiri terlihat masih sangat kecil, terlebih lagi dengan tidak adanya kawasan laut yang selalu menjadi pusat penangkapan ikan seorang pelaku usaha penangkapan ikan seperti halnya di daerah lain. Sehingga kegiatan stimulasi alat bantu penangkapan ikan sendiri masih dipandang kurang begitu

perlu dilakukan mengingat kegiatan penangkapan nelayan sendiri yang hanya terpusat pada embung, waduk, rawa serta sungai yang berada di kawasan Bojonegoro. Selain itu kegiatan ini juga masih tergantung dari kegiatan pendistribusian bantuan fasilitas alat bantu tangkap yang diberikan oleh DKP Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Peternakan dan Perikanan kepada setiap kelompok pelaku usaha penangkapan ikan yang sering tidak menentu.

4.10 Implikasi dan Output Penelitian Mengenai Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro

Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang dituangkan melalui RPJMD Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk menjadikan sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Serta dukungan melalui potensi sektor perikanan yang saat ini dimiliki Bojonegoro, yang mana dari segi kuantitas baik dari hasil produksi ikan dan jumlah pelaku usaha perikanan di Bojonegoro yang selalu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Mampu menjadikan sebuah acuan bahwa adanya potensi yang cukup baik yang dimiliki sektor perikanan di Bojonegoro apabila sektor ini terus untuk diperhatikan dan dikembangkan.

Hasil perhitungan nilai kontribusi yang menunjukkan bahwa sektor perikanan masih memiliki kontribusi yang sangat kecil bagi PAD Kabupaten Bojonegoro. Tidak menjadikan sektor ini terkesampingkan, karena dengan melihat peningkatan nilai kontribusi yang diberikan sektor perikanan dari tahun 2014 hingga 2015, menjadikan salah satu dasar lain bahwa sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro masih bisa untuk terus dikembangkan.

Melalui perhitungan nilai LQ terhadap potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang dimiliki di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dapat dilihat bahwa Kecamatan yang memiliki nilai LQ

tertinggi baik di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya adalah kecamatan yang memiliki potensi terbesar di sektor perikanan tersebut. Sehingga kecamatan yang memiliki nilai LQ paling besar menjadi prioritas pemilihan lokasi potensial yang perlu ditangani terlebih dahulu melalui kebijakan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Melalui kebijakan yang sudah tersusun, dalam hal ini 14 kegiatan yang ada dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang terpilih menurut tingkat keterdesakannya, melalui besaran nilai prosentase dari masing masing kegiatan yang didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan metode AHP dan bantuan aplikasi *expert choice* 11. Maka hasil besaran nilai prosentase dari setiap kegiatan tersebut, dapat diaplikasikan dan dilaksanakan di Kecamatan terpilih berdasarkan besaran nilai LQ yang dimiliki dengan melaksanakan kegiatan prioritas yang sesuai dengan sektor yang ada di Kecamatan tersebut. Harapannya dengan adanya prioritas program dan kegiatan yang telah terpilih untuk dilakukan terlebih dahulu, mampu mempermudah di dalam pengambilan keputusan strategi bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro untuk mengembangkan sektor perikanan yang ada disana.

Adapun output yang dihasilkan dari penelitian ini, terdiri atas 3 tahun pelaksanaan strategi prioritas. Mengingat renstra yang ada adalah renstra yang telah disusun dalam masa periode 2014-2018. Sehingga saat penelitian ini dilakukan periode renstra hanya tersisa 3 masa periode. Selain itu karena pada penelitian ini lokasi sasaran yang dituju hanyalah lokasi yang masuk dalam kategori wilayah basis perikanan tangkap dan budidaya, maka output yang dihasilkan hanya menghubungkan wilayah kecamatan yang masuk dalam kategori kegiatan pengembangan perikanan budidaya dan tangkap. Adapun output penelitian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Output Penelitian Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro

No	Kegiatan Prioritas (AHP)	Kecamatan Sasaran (LQ)		
		2016	2017	2018
Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan				
1	Pengembangan Pakan Mandiri (17,7 %)			
2	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (17,6 %)			
3	Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya (16 %)	Dander (1,35)	Sugihwaras (1,314)	Ngambon (1,304)
4	Pengembangan Sistem Pemanfaatan Lahan (15,5 %)			
5	Sarana dan Prasarana Budidaya (13,8 %)			
6	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (13,5 %)			
7	Anty Property Program (5,9 %)			
Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan, Pemasaran dan Pengolahan Produk Perikanan				
1	Diversifikasi Produk Perikanan (26,8 %)			
2	Gemarikan (24,2 %)			
3	Penyediaan Sarana Penyuluhan Ikan (18,3 %)	(-----)	(-----)	(-----)
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan (15,4 %)			
5	Penerapan Sistem Rantai Dingin dan Sanitas Hygine (15,3 %)			
Pengembangan Perikanan Tangkap				
1	Pengkayaan Sumber daya Ikan (70,9 %)	Temayang (3,206)	Margomulyo (2,344)	Ngraho (1,768)
2	Stimulasi Alat Bantu Penangkapan (29,1 %)			

Sumber: Data Primer di Olah (*Expert Choice 11*)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai **“Strategi Prioritas Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018)”** adalah sebagai berikut:

1. Keadaan umum sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro terdiri atas sub sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kegiatan perikanan tangkap dilakukan di perairan umum, meliputi sungai, waduk, embung, dan rawa. Sedangkan kegiatan perikanan budidaya dilakukan dengan 3 sistem budidaya yang meliputi, budidaya menggunakan kolam, sawah tambak dan mina padi. Dalam 5 tahun terakhir perikanan budidaya menjadi sub sektor andalan pada sektor perikanan di Bojonegoro.
2. Kontribusi sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro yang dilihat melalui PAD yang didapatkan, menunjukkan nilai kontribusi sektor perikanan pada tahun 2014 sebesar 0,0051 % dan pada tahun 2015 sebesar 0,0058 %
3. Dalam penentuan wilayah basis perikanan tangkap maupun budidaya di Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode LQ (*Location Quotient*). Kecamatan Temayang menjadi kecamatan basis perikanan tangkap dengan perolehan nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 3,206. Selain itu secara berurutan juga terdapat Kecamatan Margomulyo, Ngraho, Gondang, Purwosari, Trucuk, Kanor, Padangan, dan Malo. Sementara untuk wilayah basis perikanan budidaya Kecamatan Dander menjadi kecamatan basis perikanan budidaya dengan perolehan nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 1,35, yang disusul oleh Kecamatan Sugihwaras, Ngambon,

Sekar, Ngasem, Sukosewu, Kepohbaru, Sumberjo, Bojonegoro, Kalitidu, Bubulan, Tambakrejo, Kapas, Kasiman, Kedewan, Baureno, Balen, dan Malo.

4. Dalam penentuan program dan kegiatan prioritas dalam upaya pengembangan sektor perikanan menggunakan metode AHP dan bantuan aplikasi *expert choice* 11. Secara berurutan program prioritas yang terpilih adalah Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan, Program Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan, Pengelolaan, dan Pemasaran Produk Perikanan, dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Sementara secara berurutan kegiatan prioritas yang terpilih adalah Pengembangan Pakan Mandiri, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan, Pengembangan Sistem Pemanfaatan Lahan, Sarana dan Prasaran Budidaya Ikan, Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Diversifikasi Produk Olahan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Penyediaan Sarana Penyuluhan Ikan, *Anty Proverty Program*, Penerapan system rantai dingin dan sanitas *hygiene*, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran, Pengkayaan Sumberdaya Ikan, dan Stimulasi Alat Bantu Penangkapan Ikan.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian mengenai **“Strategi Prioritas Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018)”** adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

- Dengan adanya output yang dihasilkan pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi serta alternatif pengambilan keputusan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tercantum dalam renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro pada masa periode 2016-2018.
- Kegiatan pengembangan pakan mandiri yang terpilih menjadi kegiatan prioritas dalam upaya pengembangan sektor perikanan budidaya dan kawasan minapolitan, perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Sebagai penunjang kegiatan ini perlu adanya peningkatan kuantitas mesin pakan yang diberikan kepada pelaku usaha pembudidaya ikan.
- Kegiatan pengkayaan sumberdaya ikan yang terpilih menjadi kegiatan prioritas dalam upaya pengembangan sektor perikanan tangkap, perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Sebagai penunjang keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan di Bojonegoro, perlu adanya peningkatan kuantitas sumberdaya ikan yang disebar di seluruh perairan umum.
- Perlu adanya arsip data dokumen terkait keadaan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro yang lebih lengkap.

2. Peneliti

Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan antara lain:

- Identifikasi yang lebih detail, untuk mengetahui potensi perikanan yang saat ini ada di Kabupaten Bojonegoro menurut jenis komoditas ikan yang menjadi hasil produksi di setiap Kecamatan untuk sektor perikanan Budidaya di Bojonegoro.

- Pemilihan lokasi yang tepat untuk pelaksanaan program Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- Pengamatan terkait kontribusi yang diberikan sektor perikanan Kabupaten Bojonegoro setelah periode Renstra tahun 2014-2018 berakhir.
- Melihat dan menghitung nilai keberlanjutan sektor perikanan di Kabupaten Bojonegoro dibanding sektor lain dengan menggunakan metode MDS

3. Masyarakat

Menjadikan peluang usaha di sektor perikanan baik usaha budidaya maupun penangkapan ikan, dengan cara melihat potensi yang ada di setiap wilayah kecamatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman S. 2014. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. [Kuliah Umum] di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanudin. Makasar
- Badan Pusat Statistik. 2015 .Bojonegoro Dalam Angka 2015. Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2015. Data Perikanan Nasional. Diakses pada [http://:www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) pada tanggal 5 April 2016 pukul 09.00 WIB
- Baihaqi. 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Fakultas Ekonomi. Universitas Bengkulu. Bengkulu
- Cahyaningrum A. 2015. Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri Jawa Timur. [Skripsi]. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Barajaya. Malang
- Hilmiyati F. 2013. Analisis Potensi Ekonomi di Kota Depok Periode 2000-2010. [Skripsi]. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Lewis A. Perencanaan Pembangunan Dasar-Dasar Kebijaksanaan Ekonomi. Rineka Cipta. Jakarta
- Masyahoro A. 2006. Analisis Kebijakan Pengembangan Perikanan *Purse Seine* Dengan Metode *Analitycal Hierarchi Process (AHP)* Di Perairan Parigi Moutong. Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian. Universitas Tadulako Palu.
- Pangerang. 2014. Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Kecamatan di Kabupaten Maros.[Karya Ilmiah] Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Maros
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Tumada L O. 2012. Analisis Strategi Pembangunan Kabupaten Muna. [Tesis]. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia. Jakarta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomer 32. 2004. Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Republik Indonesia Nomer 33. 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomer 45. 2009. Perikanan

Wirartha I. 2005. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Jogjakarta. Andi



Lampiran 2. RENSTRA Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2014	TARGET				STRATEGI MENCAPAI TUJUAN			BIDANG PELAKSANA
					2015	2016	2017	2018	Kebijakan	Program	Kegiatan	
Meningkatnya masyarakat yang mengetahui pentingnya ikan	Persentase peningkatan Masyarakat yang mengetahui pentingnya ikan	Jumlah Orang $n - (n-1) / (n - 1) \times 100$	Orang	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	Meningkatkan konsumsi ikan	Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Bidang Usaha Perikanan
					50	33,3	25	20				
										Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengkayaan Sumberdaya Ikan	
Meningkatnya sarana dan prasarana budidaya ikan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan	Jumlah Kelompok $n - (n-1) / (n - 1) \times 100$	Klp.	37	77	102	127	152	Pengembangan kawasan minapolitan	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Bidang Usaha Perikanan
					108	32,5	24,5	19,7				
Meningkatnya pembudidaya ikan dan nelayan yang	Persentase peningkatan Pembudidaya ikan dan	Jumlah Orang	Orang	400	630	830	1030	1230	Meningkatkan SDM	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Bidang Usaha Perikanan

menguasai teknologi perikanan	nelayan yang mendapat pelatihan	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1) \times 100}$	%		57,5%	31,7	24,1	19,4				
											Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Bidang Usaha Perikanan
											Anti Poverty Program (APP)	Bidang Usaha Perikanan
											Pengembangan Sistem Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan Budidaya.	Bidang Usaha Perikanan
											Pengembangan Pakan mandiri	Bidang Usaha Perikanan
Meningkatnya kualitas tenaga	Persentase peningkatan Penyuluh	Jumlah Orang	Orang	10	15	20	25	30	Meningkatan SDM	Prasarana pengembangan sistem	Penyediaan Sarana prasarana Penyuluhan	Bidang Usaha

penyuluh dan tenaga teknis perikanan	perikanan yang mendapat pelatihan	$n - (n - 1) / (n - 1) \times 100$	%		50	33,3	25	25		penyuluhan perikanan	Perikanan	Perikanan
Meningkatnya peran kelembagaan pembudidaya ikan	Pembudidaya ikan yang tergabung dalam Unit Pelaksana Pengembangan (UPP)	Jumlah Orang/Klp $n - (n - 1) / (n - 1) \times 100$	Orang/Klp %	30	45	60	75	90	Meningkatkan kelembagaan perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Bidang Usaha Perikanan
					50	33,3	25	20				
											Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Bidang Usaha Perikanan
Meningkatnya ketersediaan benih ikan.	Presentase peningkatan Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) yang mendapat bantuan Sarana Prasarana Pembenihan	Jumlah Kelompok %	Kelompok $n - (n - 1) / (n - 1) \times 100$	10	16	21	26	31	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembenihan Ikan	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Bidang Usaha Perikanan
Meningkatnya ekstensifikasi	Persentase peningkatan	Jumlah	Kelompok	156	283	413	463	513	Meningkatkan Sarana	Pengembangan Budidaya	Pembinaan dan Pengembangan	Bidang Usaha

dan intensifikasi lahan budidaya	Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan kolam	Kelompok	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1) \times 100}$		81,4	45,9	12,1	10,8	Prasarana Budidaya Ikan	Perikanan	Perikanan	Perikanan
											Anti Poverty Program (APP)	
											Pengembangan Sistem Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan Budidaya.	
Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan ikan	Persentase peningkatan Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan alat bantu penangkapan ikan.	Jumlah Kelompok	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1) \times 100}$	18	18	18	23	28	Meningkatkan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan	Pengembangan Perikanan Tangkap	Stimulan alat bantu penangkapan ikan	Bidang Usaha Perikanan
Meningkatnya kawasan	Kelompok pengolah dan	Jumlah	Kelompok	10	15	20	25	30	Meningkatkan Sarana	Optimalisasi pengelolaan dan	Diversifikasi Produk Olahan	Bidang Usaha

pengolahan hasil produksi perikanan	pemasaran ikan yang mendapat Sarana dan prasarana pengolahan ikan	Kelompok	%	$n - (n - 1) / (n - 1) \times 100$	50	33,33	25	20	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemasaran Produksi Perikanan.	Bernilai Tambah	Perikanan	
											Penerapan Sistem Rantai Dingin dan Sanitasi Higiene		
											Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan.		
Meningkatnya pengolahan dan jaringan pemasaran hasil pertanian dan kehutanan	Persentase peningkatan Pengolahan hasil perikanan	Ton	%	$n - (n - 1) / (n - 1) \times 100$	582,90	629,50	679,80	734,20	792,90	Pengolahan hasil produksi peternakan	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Bidang Usaha Perikanan

Lampiran 3. Expert Choice

Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro

Goal: strategi pengembangan

- optimalisasi kegiatan penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran produk perikanan (L: .183)
 - penyedia sarana penyuluhan perikanan (L: .183)
 - kampanye Gemarikan (L: .242)
 - Diversifikasai produk olahan (L: .268)
 - Penerapan sistem rantai dingin dan sanitas hygiene (L: .153)
 - penyediaan sarana dan prasarana pemasaran (L: .154)
- pengembangan perikanan tangkap (L: .163)
 - pengkayaan sumberdaya ikan (L: .709)
 - stimulasi alat bantu penangkapan ikan (L: .291)
- pengembangan perikanan budidaya dan kawasan minapolitan (L: .549)
 - sarana dan prasarana budidaya ikan (L: .138)
 - pembinaan dan pengembangan perikanan (L: .176)
 - pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (L: .160)
 - APP (L: .059)
 - pengembangan sistem pemanfaatan lahan (L: .155)
 - pengembangan pakan mandiri (L: .177)
 - pengembangan bibit ikan unggul (L: .135)

Children of Current Node	Priority
optimalisasi kegiatan	.287
pengembangan perikanan	.163
pengembangan perikanan	.549

Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan (Level Pertama)

Sort by Name | Sort by Priority | Unsort | Normalize | Continue

Priorities with respect to: Combined

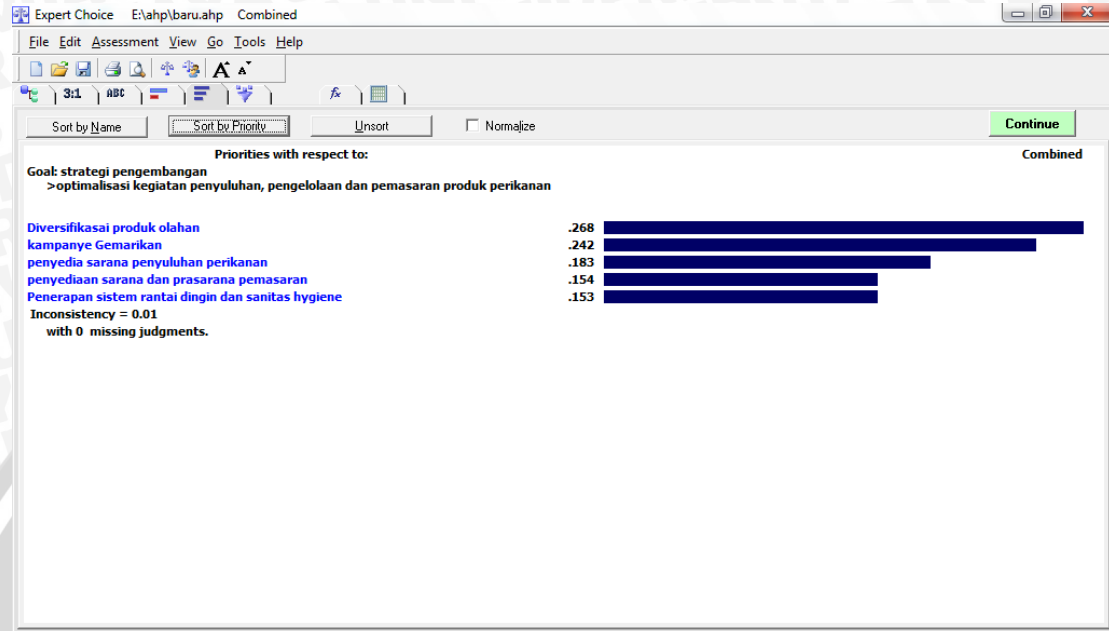
Goal: strategi pengembangan	Priority
pengembangan perikanan budidaya dan kawasan minapolitan	.549
optimalisasi kegiatan penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	.287
pengembangan perikanan tangkap	.163

Inconsistency = 0.06
with 0 missing judgments.

Synthesis Results

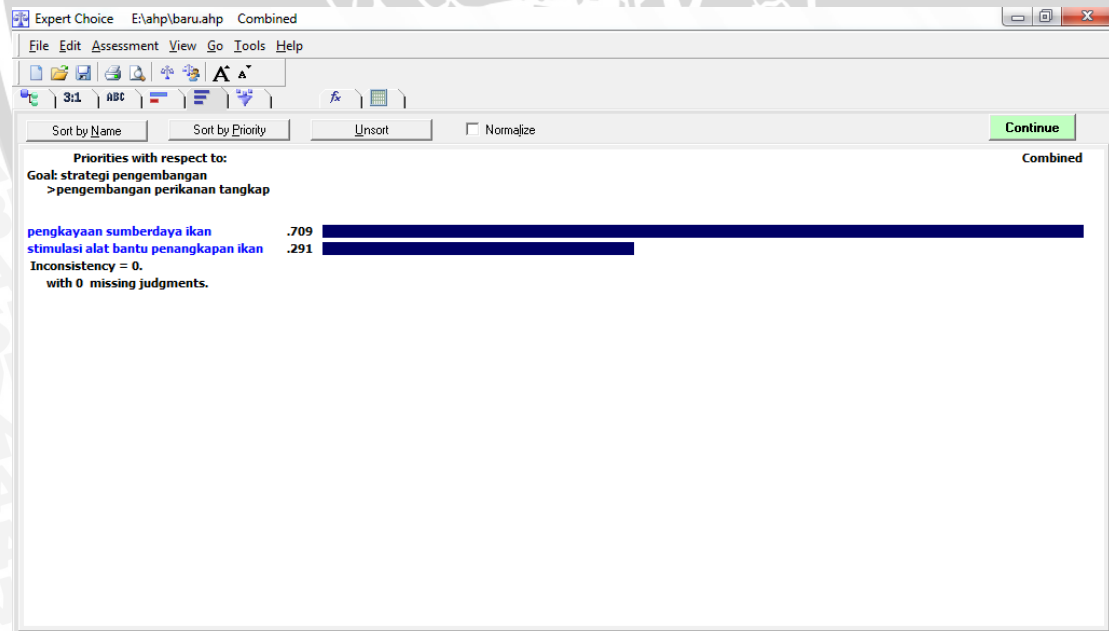
Startegi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan (Level Kedua)

Program Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan



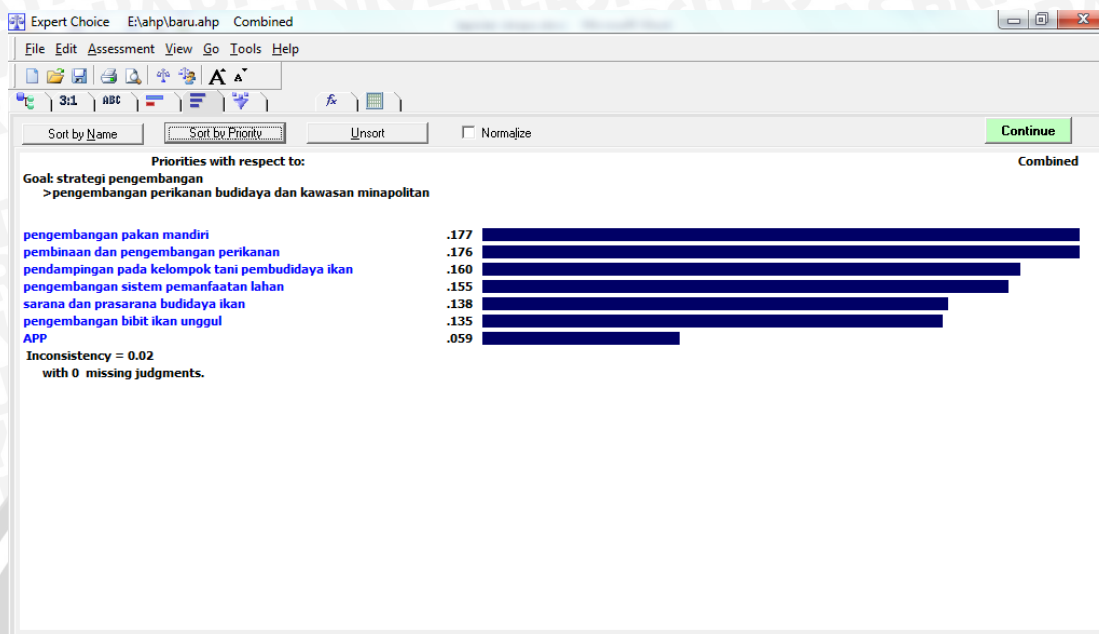
Startegi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan (Level Kedua)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

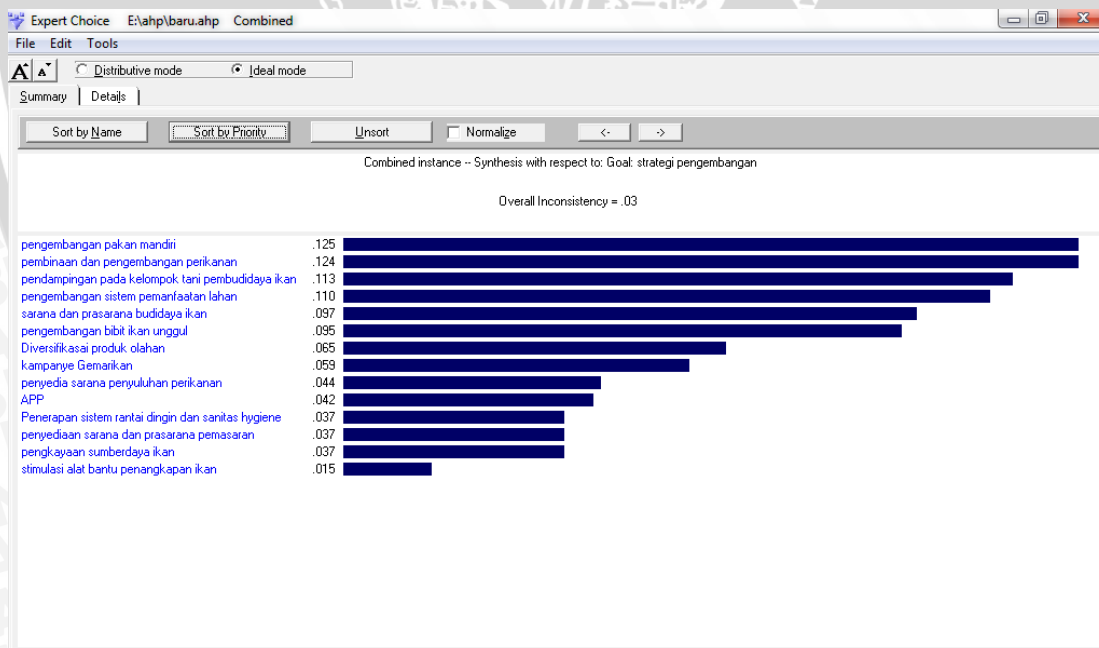


Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan (Level Kedua)

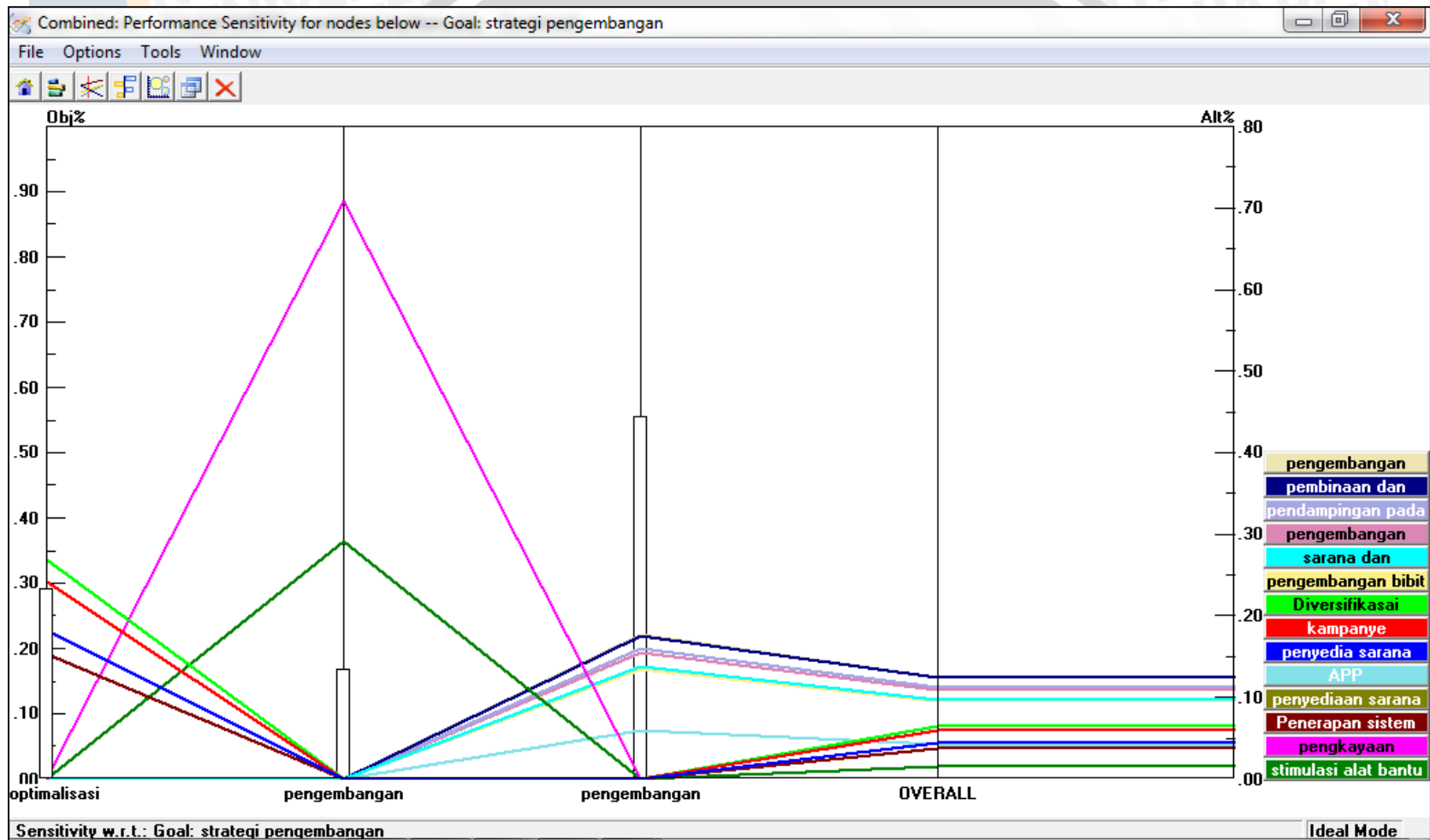
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kawasan Minapolitan



Penilaian Bobot Akhir Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro



Penilaian Bobot Akhir Strategi Prioritas Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Bojonegoro
(Overall Expert Choice 11)



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro

